

**EVALUASI PENGAWASAN
KREDIT MODAL KERJA SEBAGAI UPAYA
MENEKAN TUNGGAKAN KREDIT**
(Studi kasus pada Kredit Modal Kerja
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

PUJIASTUTI

0410320110



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2009**

"MOTTO"

"hari ini harus lebih baik dari esok, hari ini pengalaman esok
adalah masa depan"

"Segala hal yang dilakukan didunia ini, semata-mata untuk mencari
ridha Allah"

"Seseorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaknya
salah seorang kalian memilih siapa yang menjadi temannya."
(HR. Abu Daud)

"Jika kau bersahabat, bersahabatlah dengan orang yang terpuji,
yang memiliki kesucian diri, rasa malu, dan kemuliaan. Ia
mengatakan tidak pada sesuatu jika kau berkata tidak, dan jika
kau berkata ya, maka ia pun berkata ya..."
(Persahabatan, Ibnu Mubarak.)

"Takdir Tuhan itu berada di ujung usaha manusia, Tuhan Maha
Adil, Dia akan memberikan sesuatu kepada umatNya sesuai
dengan kadar usaha dan ikhtiarnya"

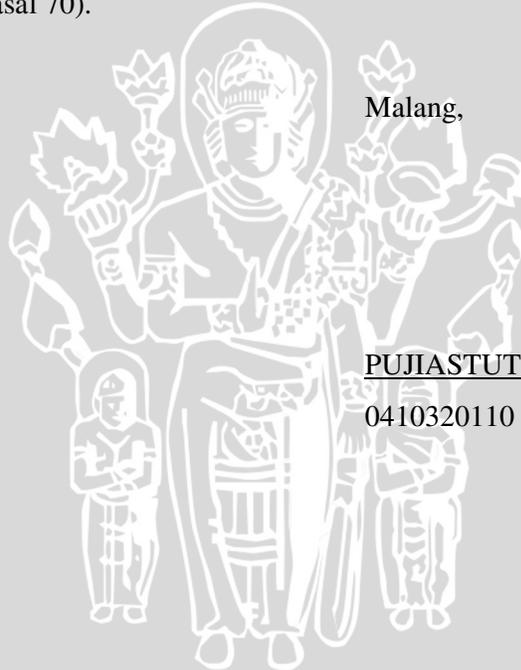
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diperoleh sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang,

Januari 2009



PUJIASTUTI

0410320110

RINGKASAN

Pujiastuti 2008, Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung), Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si, Drs. Topowijono, M.Si, 120hal + xix.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung sebagai salah satu Bank Umum Pemerintah membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan kepada nasabahnya terutama dalam pemberian kredit. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah dengan menyediakan sumber dana untuk kredit modal kerja. Kredit Modal Kerja merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1(satu) tahun.

Dalam penyaluran kredit disamping memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit juga harus melakukan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan. Pengawasan dilakukan pada saat diberikan sampai dengan kredit tersebut dilunasi kembali oleh debitur. Resiko yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tulungagung adalah kredit bermasalah. Apabila tunggakan yang terjadi tidak segera mendapat perhatian maka tunggakan akan dapat semakin meningkat. Untuk itu ditetapkan suatu pengawasan kredit yang tujuannya untuk menekan terjadinya tunggakan kredit. Pengawasan kredit perlu diadakan secara terus menerus, baik secara intern maupun ekstern. Secara intern melibatkan bagian yang terkait dalam bidang perkreditan, sedangkan secara ekstern meliputi kondisi serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan penyajian angka-angka perhitungan untuk menghitung tunggakan kredit. Variabel yang digunakan adalah variabel pengawasan kredit dan tunggakan kredit modal kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung dibagi menjadi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung berjalan kurang efektif dengan adanya jumlah tunggakan kredit modal kerja yang terus meningkat dari tahun ketahun. Prosentase tunggakan selama 3(tiga) tahun tersebut sudah berada dalam batas normal yaitu diatas tingkat kredit bermasalah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

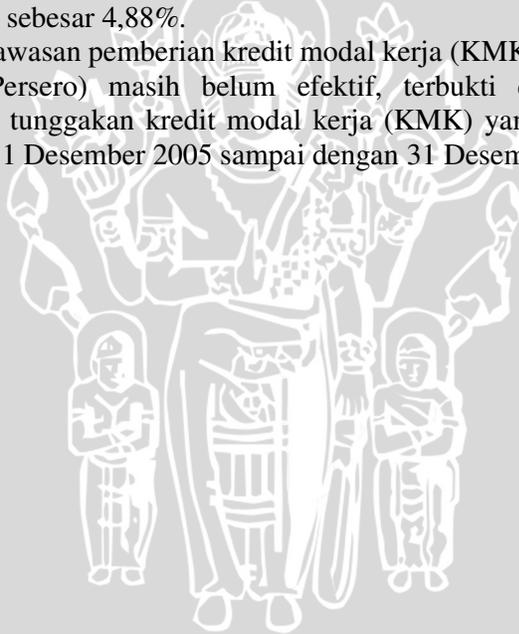
Perbandingan jumlah kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode yaitu periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 diketahui bahwa jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2005 sebesar Rp 217.892.638,00, pada tahun 2006 sebesar Rp 255.098.092 dan pada tahun 2007 sebesar 308.117.933.

Berdasarkan perbandingan jumlah debitur yang mengalami tunggakan yang ada pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M) dapat diketahui bahwa total prosentase debitur pada tahun 2005 dengan jumlah

prosentase 7,7431% dengan rincian pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL) dengan prosentase 0,7554%, Diragukan (D) dengan prosentase 6,5420% dan Macet (M) terdiri dari 53 debitur dengan prosentase 6,2480%. Tahun 2006 dengan total prosentase debitur sebesar 5,6235% dengan rincian pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL) sebesar 0,3867%, Diragukan (D) sebesar 0,5317% dan Macet (M) sebesar 5,6235%. Sedangkan pada tahun 2007 total prosentase jumlah debitur 6,5683% dengan rincian 0,9308% pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL), sebesar 1,1239% pada kolektibilitas Diragukan (D) dan 6,5683% pada kolektibilitas Macet (M).

Perbandingan prosentase jumlah tunggakan kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa total tunggakan kredit pada tahun 2005 sebesar 7,76% dengan rincian 1,52% pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL), 0,24% pda kolektibilitas Diragukan (D) dan 5,90% pada kolektibilitas Macet (M). Pada tahun 2006 total tunggakan kredit yang disalurkan sebesar 6,06% dengan rincian 0,43% pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL), 0,25% pada kolektibilitas Diragukan (D) dan 5,37% pada kolektibilitas Macet (M). Sedangkan pada tahun 2007 total jumlah tunggakan kredit yang disalurkan sebesar 6,23%, dengan rincian pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL) sebesar 0,97%, Diragukan (D) 0,47% dan Macet (M) sebesar 4,88%.

Pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja (KMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih belum efektif, terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah tunggakan kredit modal kerja (KMK) yang terjadi selama 3(tiga) periode yaitu 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2007.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Selama proses penyelesaian skripsi, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suhadak, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. Kusdi Raharjo, DEA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Topowijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing sekaligus yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan juga motivasi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.

6. Bpk. Eka Budi Lestiawan selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang dipimpin.
7. Bpk. Wasongko selaku Supervisor Administasi Kredit , Bpk. Subagio selaku Kasihat Administrasi Kredit beserta seluruh staf terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini.
8. Mamak, Bapak, Didik dan Ivan yang tercinta, terima kasih atas dukungannya selama penyusunan skripsi ini.
9. Koko Hendrik terima kasih atas doa, dukungan, bantuan ksh sayang dan kesabarannya selama ini.
10. Sahabat2 q terkasih Sindha, Bulkiez dan keluarga terima kasih atas semua bantuan, perhatian kalian.
11. Sahabat2 q terkasih Tya, Nety, Defy, Paper, Pedro, Agung'Kangmas , Dian, Agus terima kasih buat semua bantuan kalian ya.
12. Sahabat2 koz Kertosarori 63, Nana, Noven, Mbak Trya, Nuri, Ncup, Rinthol, dan Linda, terima kasih buat doa, bantuan, kasih sayang, persahabatan kalian.
13. Teman-teman Administrasi Bisnis dan MK '04 yang telah banyak membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan informasi dan bimbingan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar atas kebaikan yang telah diberikan pada pada penulis. Mudah–mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
LAMPIRAN	
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kontribusi Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	5
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perbankan	7
1. Pengertian Bank	7
2. Fungsi Bank	8
3. Jenis Bank	8
B. Kredit	10
1. Pengertian Kredit	10
2. Unsur Kredit	11
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	11
4. Jenis Kredit	12
5. Resiko Kredit	14
6. Jaminan Kredit	15
7. Prinsip Penilaian Kredit	17
8. Kebijakan Perkreditan Bank	20
9. Prosedur Umum Kredit	21

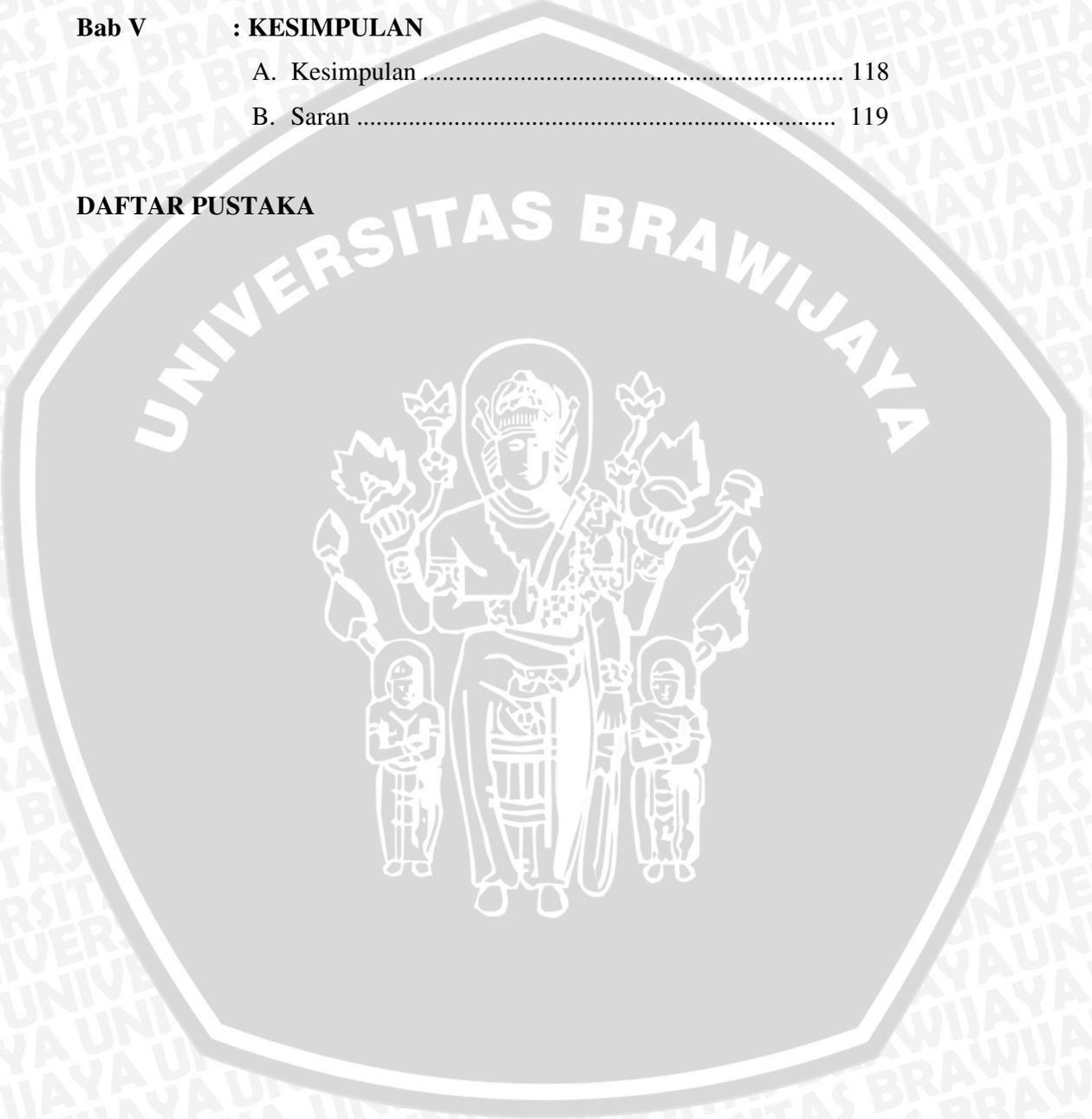
10. Kolektibilitas Kredit	23
C. Pengawasan Kredit	26
1. Pengertian Pengawasan Kredit	26
2. Tujuan Pengawasan Kredit	27
3. Macam Pengawasan Kredit	28
4. Teknik Pengawasan Kredit	28
5. Aspek Pengawasan Kredit	31
D. Modal kerja	32
E. Tunggakan Kredit	33
1. Pengertian Tunggakan Kredit	33
2. Penyebab Tunggakan Kredit	34
3. Tindakan Penyelamatan Kredit	34
Bab III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Instrumen Penelitian	39
G. Analisis Data	39
Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	41
1. Sejarah Singkat BRI.....	41
2. Lokasi Penelitian	42
3. Visi dan Misi	42
4. Struktur Organisasi	42
5. Produk dan Jasa Pelayana BRI	53
B. Penyajian Data	56
1. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja	54
2. Data Tunggakan Kredit	64
3. Pengawasan Kredit Modal Kerja	75
C. Analisis dan Interpretasi Data	78

1. Analisis Struktur Organisasi	78
2. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit	79
3. Analisis Tunggalan Kredit	83
4. Analisis Pengawasan Kredit	114

Bab V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
4.1	Struktur Organisasi	39
4.2	Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung	55



DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
2.1	Kolektibilitas kredit dengan angsuran (Non KPR)	24
2.2	Kolektibilitas dengan angsuran	25
2.3	Kolektibilitas tanpa angsuran	25
4.1	Laporan Kolektibilitas Kredit Modal Kerja Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung	65
4.2	Laporan Tunggalan Kredit Modal Kerja Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung	67
4.3	Laporan kolektibilitas tunggalan kredit modal kerja (KMK) berdasarkan laporan Account Officer periode 31 Desember 2005	69
4.4	Laporan kolektibilitas tunggalan kredit modal kerja (KMK) berdasarkan laporan Account Officer periode 31 Desember 2006	71
4.5	Laporan kolektibilitas tunggalan kredit modal kerja (KMK) berdasarkan laporan Account Officer periode 31 Desember 2007	73
4.6	Pelaksanaan pengawasan kredit	77
4.7	Hasil prosentase (%) debitur kredit modal kerja periode 31 Desember 2005 s/d periode 31 Desember 2007	85
4.8	Hasil analisis prosentase (%) debitur kredit modal kerja berdasarkan jenis kredit periode 31 Desember 2005	88
4.9	Hasil analisis prosentase (%) debitur kredit modal kerja berdasarkan jenis kredit periode 31	91

	Desember 2006	
4.10	Hasil analisis prosentase (%) debitur kredit modal kerja berdasarkan jenis kredit periode 31 Desember 2007	94
4.11	Perbandingan Prosentase (%) Jumlah Debitur Periode 31 Desember 2005 s/d Periode 31 Desember 2007	95
4.12	Perbandingan Tunggakan Kredit Modal terhadap Kredit yang disalurkan Periode 31 Desember 2005 s/d Periode 31 Desember 2007	100
4.13	Perbandingan Tunggakan Kredit Modal terhadap Kredit yang disalurkan berdasarkan jenis kredit yang disalurkan Periode 31 Desember 2005	103
4.14	Perbandingan Tunggakan Kredit Modal terhadap Kredit yang disalurkan berdasarkan jenis kredit yang disalurkan Periode 31 Desember 2006	106
4.15	Perbandingan Tunggakan Kredit Modal terhadap Kredit yang disalurkan berdasarkan jenis kredit yang disalurkan Periode 31 Desember 2007	109
4.16	Perbandingan Prosentase (%) Tunggakan Kredit yang disalurkan berdasarkan jenis kredit yang diberikan Periode 31 Desember 2005 s/d Periode 31 Desember 2007	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan perbankan dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Hampir sebagian besar transaksi keuangan yang dilakukan memerlukan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik lembaga sosial maupun lembaga bisnis. Begitu pentingnya perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya (Kasmir, 2006:2).

Perkembangan dunia usaha mengakibatkan persaingan antar perusahaan yang makin ketat. Berbagai macam strategi dan kebijakan digunakan untuk mencapai eksistensi pertumbuhan perusahaan. Namun dalam menjalankan strategi dan kebijakan tersebut memerlukan dana modal yang cukup banyak. Modal merupakan salah satu penunjang guna tercapainya eksistensi kegiatan usaha. Semakin berkembang kegiatan usaha, modal yang digunakan juga makin meningkat. Oleh karena itu dalam meningkatkan produktifitas kerja dan modal dari suatu usaha, perbankan mempunyai peranan penting dalam rangka mengatasi problema kekurangan modal dengan harapan dapat memberikan manfaat baik bagi pengusaha dan bagi pihak lain. Ada berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan modal ini, salah satu alternatifnya adalah dengan meminjam pada pihak-pihak eksternal perusahaan yang dalam hal ini adalah bank.

Peranan Bank sebagai Lembaga Keuangan selalu berkaitan dengan masalah kredit. Sesuai dengan pengertian bank dalam Undang Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu “Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank sebagai Lembaga Keuangan mengandalkan

pemberian kredit sebagai salah satu kegiatan utama untuk menghasilkan pendapatan utama disamping aktivitas pelayanan lainnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Salah satu bentuk kredit dalam penggunaannya adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit modal kerja diperlukan untuk membiayai keperluan-keperluan yang habis dalam satu siklus usaha yaitu meliputi jangka waktu dari pengeluaran uang tunai sampai dengan uang tunai tersebut dapat diterima kembali dalam bentuk uang tunai juga (Muljono, 2001:245).

Menurut Kasmir (2006:104) dalam menyalurkan kredit, bank melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang ada pada debitur, yaitu faktor 5C yang meliputi Character (*kepribadian*), Capacity (*kemampuan*), Capital (*modal*), Conditional (*kondisi*) dan Collateral (*jaminan*). Selain juga harus memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit yaitu menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai, meliputi aspek yuridis/ hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/ operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi dan aspek amdal. Walaupun demikian terkadang bank juga melakukan ketidaktelitian dalam menganalisis kredit, baik itu masalah persyaratan atau kebijaksanaan yang diberikan, sehingga menimbulkan beberapa kendala, misalnya terdapat tunggakan kredit.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam kegiatan usaha perkreditan. Kegiatan pengawasan akan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan (diinvestasikan) di bidang perkreditan. Kegiatan pengawasan menjadi penting mengingat bahwa kredit merupakan "*risk asset*" bagi bank karena asset bank tersebut dikuasai pihak luar bank yaitu oleh nasabah (Muljono, 2001:459). Pengawasan yang efektif akan sangat berperan membantu dalam menekan tunggakan-tunggakan kredit yang terjadi. Pengawasan

bertujuan agar kredit yang diberikan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh debitur, sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan. Prosedur pemberian kredit yang tepat hendaknya dapat menjamin ketepatan sasaran kredit, ketepatan penggunaan kredit dan ketepatan dalam waktu pengembalian kredit. Sasaran kredit menentukan dimana kredit yang diberikan benar-benar harus dapat aktif mendukung perkembangan usaha debitur dan kredit yang diberikan akan menjadi pendapatan dan keuntungan bank. Kebenaran nasabah dalam penggunaan dana kredit harus disesuaikan dengan proposal permohonan kredit yang diajukan disesuaikan dengan maksud dan tujuan penggunaan kredit yang diberikan kepada perusahaan. Ketepatan dalam pengembalian kredit harus disesuaikan dengan ketetapan debitur tentang kesanggupan debitur dalam membayar bunga dan melunasi kredit, sesuai dengan syarat dan jadwal pembayaran yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kredit bermasalah, dimana debitur mengingkari janji dalam pembayaran kredit sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran kredit.

Penyimpangan sering terjadi sejak kredit diberikan sampai kredit dilunasi oleh debitur. Apabila dalam pemberian kredit bank kurang memperhatikan aspek pengawasan maka segala permasalahan yang timbul baru dapat diketahui setelah masalah tersebut menjadi sulit diatasi. Akibat dari keadaan tersebut, kualitas kredit yang diberikan juga memburuk dan jumlah tunggakan akan semakin meningkat. Adanya kredit yang bermasalah, akan butuh waktu, dana dan tenaga yang cukup untuk mengatasinya. Akibat lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya resiko kredit maka bank perlu melakukan pengamatan terhadap kredit yang disalurkan dengan melakukan fungsi sistem pengawasan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung sebagai salah satu Bank Umum Pemerintah membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan kepada nasabahnya terutama dalam pemberian kredit.

Kredit Modal Kerja merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus

usaha dengan jangka waktu maksimal 1(satu) tahun. Sistem dan prosedur yang tepat merupakan hal yang diperlukan untuk menjaga agar dana kredit dapat diberikan kepada calon debitur dapat dipergunakan secara efektif sesuai dengan tujuan proposal permohonan kredit.

Resiko yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tulungagung adalah kredit bermasalah. Apabila tunggakan yang terjadi tidak segera mendapat perhatian maka tunggakan akan dapat semakin meningkat. Untuk itu ditetapkan suatu pengawasan kredit yang tujuannya untuk menekan terjadinya tunggakan kredit. Pengawasan kredit perlu diadakan secara terus menerus, baik secara intern maupun ekstern. Secara intern melibatkan bagian yang terkait dalam bidang perkreditan, sedangkan secara ekstern meliputi kondisi serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Adapun tunggakan kredit yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung selama 3(tiga) periode 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2007 yaitu:

Tahun	Kategori Kolektibilitas					Total Tunggakan Kredit
	Lancar (L)	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	
2005	197.928.032	3.246.763	3.320.624	520.482	12.876.737	27.892.638
2006	216.805.014	22.832.314	1.095.889	656.383	13.708.492	255.098.092
2007	261.379.838	27.255.526	2.999.524	1.453.222	15.029.823	308.117.933

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung

Berdasar uraian tersebut maka penulis mengambil judul "Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit" (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tulungagung?

2. Bagaimana pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) yang seharusnya diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tulungagung dalam upaya menekan tunggakan kredit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pengawasan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengawasan Kredit Modal Kerja yang seharusnya diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung dalam upaya menekan tunggakan kredit.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan sistem pengawasan.

2. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pengetahuan tambahan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang skripsi ini, berikut adalah sistematika pembahasan :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian yang diuraikan menjadi beberapa subbab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan landasan teori yang mendukung pembahasan masalah yang meliputi masalah yang meliputi tinjauan umum perbankan, kredit, pengawasan dan tunggakan kredit.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian, meliputi penyajian data yang diperoleh dari perusahaan, analisis dan interpretasi data yang diperoleh berkenaan dengan pengawasan kredit.

Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian isi penelitian secara singkat, serta dicantumkan pula saran-saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi instansi kredit.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang selalu dikaitkan dengan uang, hal ini dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Lembaga perbankan di Indonesia mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan serta menjaga stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kasmir (2007:11) pengertian bank adalah sebagai berikut:

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Pengertian Bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah “Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana
- c. Perantara dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang penting peranannya dalam masyarakat dengan usaha pokok memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Budisantoso, 2006:9):

- a. Lembaga yang berlandaskan kepercayaan (*agent of trust*)
Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
- b. Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi (*agent of development*)
Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan pada sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
- c. Lembaga yang memberikan jasa (*agent of service*)
Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

3. Jenis Bank

Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2007:19) jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:

- a. Dilihat dari segi fungsinya:
Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:
 - 1) Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara *konvensional* atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja pihak yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah:

1) Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank itu sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta nasional.

3) Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang seharusnya dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri, dalam artian kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional.

c. Dilihat dari segi status

Dilihat dari kemampuan melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

- 1) Bank devisa
Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
 - 2) Bank non devisa
Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.
- d. Dilihat dari segi cara menentukan harga
- Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu:
- 1) Bank yang berdasarkan prinsip *konvensional* (Barat)
Merupakan bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu dengan menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan menerapkan berbagai biaya-biaya nominal atau prosentase tertentu untuk jasa-jasa bank lainnya.
 - 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)
Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*cedere*” yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Dalam praktik sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain (Muljono, 2001:9): “Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian kredit”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang yang menimbulkan tagihan

kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu dan jangka waktu tertentu yang disepakati serta saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

2. Unsur-unsur Kredit

Didalam kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2006:103) adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan.
- b. Kesepakatan
Kesepakatan kredit dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikururkan.
- c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu kredit mencakup masa pengambalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah satu tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun).
- d. Resiko
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka makin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko kredit menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.
- e. Balas jasa
Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebaskan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak lepas dari misi bank tersebut didirikan (Kasmir, 2006:105). Adapun tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan

Tujuan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka akan dapat membantu pihak debitur dalam mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil.

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain (Hasibuan, 2006:88):

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang
- d. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain)
- e. Meningkatkan produktivitas yang ada
- f. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang
- g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan
- i. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat
- j. Mengubah cara berpikir/ bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

4. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit yang beragam pula. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2006:109):

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau untuk keperluan rehabilitas.

2) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya

- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - 1) Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - 2) Kredit konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - 3) Kredit perdagangan
Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
 - 1) Kredit jangka pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1(satu) tahun atau paling lama 1(satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - 2) Kredit jangka menengah
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kreditnya antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
 - 3) Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun dan biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.
- d. Dilihat dari segi jaminan
 - 1) Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
 - 2) Kredit tanpa jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lainnya.
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kreditpun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:
 - 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.
 - 2) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - 3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai produksi, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

- 4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha pertambangan.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- 8) Dan sektor–sektor usaha lainnya.

5. Resiko Kredit

Dalam setiap bentuk usaha selalu dihadapkan pada resiko, hal ini sudah merupakan sesuatu yang biasa yang membedakan cuma bobot satu dengan yang lain berbeda. Begitu pula dalam pemberian kredit juga terkandung resiko yang perlu terlebih dahulu dipahami dalam proses perencanaan pemberian kredit, karena resiko ini juga akan membawa kendala bagi keberhasilan proses perkreditan tersebut.

Menurut Muljono (2001:80) terdapat berbagai bentuk resiko perkreditan yang perlu dipahami antara lain:

- a. Resiko dari sifat usaha
Dari sifat–sifat usaha akan dapat diketahui tinggi/ rendahnya tingkat resiko usaha dengan berbagai kriteria, antara lain:
 - 1) Turn over usaha makin tinggi maka semakin tinggi resikonya.
 - 2) Tingkat spesifikasi/ kekhususan usaha, semakin khusus bidang usaha semakin tinggi resikonya.
 - 3) Investasi pada aktiva lancar modal/ kerja, semakin besar investasi pada modal kerja maka resiko akan semakin tinggi dibandingkan dengan usaha yang investasi pada barang–barang modal.
 - 4) Usaha dengan padat modal pada negara berkembang akan mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang banyak mengerahkan tenaga. Tetapi sebaliknya pada negara maju usaha padat karya akan mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang padat modal.
 - 5) Karena memang sifat dari pekerjaannya itu sendiri yang mempunyai resiko tinggi, misalnya pengeboran minyak bumi di lepas pantai.
- b. Resiko geografis
Faktor geografis juga mempunyai pengaruh terhadap besarnya resiko dari suatu kegiatan usaha. Resiko geografis erat hubungannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada suatu lokasi tertentu, selain juga adanya faktor lingkungan.
- c. Resiko politik
Banyak kegagalan perkreditan karena tidak adanya kebijaksanaan politik yang jelas. Oleh karena itu, kestabilan politik disuatu negara/ daerah akan

merupakan faktor yang cukup menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha.

d. Resiko ketidakpastian (*uncertainly*)

Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung resiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik.

e. Risiko inflasi

Bentuk resiko lain yang sifatnya abstrak adalah resiko karena adanya inflasi. Walaupun utang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh nasabah, tetapi pada masa inflasi yang tinggi bank telah menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang dipinjamkan kepada nasabahnya. Hal ini merupakan suatu ancaman terhadap modal bank karena adanya inflasi laba bank akan *over stated*. Laba yang *over stated* akan mengakibatkan pembayaran pajak dan pembagian laba yang semakin tinggi, akibatnya terjadi *kanibalisme* modal.

f. Resiko persaingan

Untuk memasuki pasaran setiap jenis usaha harus telah siap bersaing dengan lawan-lawan bisnisnya. Resiko persaingan ini dapat berupa persaingan terhadap sesama bank sendiri yang membiayai proyek yang sama, atau persaingan antara perusahaan-perusahaan sejenis yang menjadi objek perkreditan. Dan sudah tentu untuk dapat memenangkan persaingan ini dituntut adanya sistem kerja yang efisien termasuk perencanaan.

6. Jaminan Kredit

Di dalam menjalankan suatu usaha apapun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Resiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan seperti terkena bencana alam, namun resiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar kewajibannya. Adapun resiko kerugian akibat nasabah tidak mampu membayar kewajibannya baik untuk sementara waktu maupun selamanya harus segera diantisipasi. Kalau tidak maka dapat dipastikan kredit tersebut macet.

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Yang penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya, nasabah akan terikat dengan bank mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, SK DIR BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, *jaminan* pemberian kredit adalah

keyakinan bank atas kesanggupan debitur melunasi kredit sesuai perjanjian. Jaminan pemberian diperoleh melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Sedangkan *agunan* adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit. Agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

Menurut Sinungan (1991:134) dalam penilaian jaminan perlu diperhatikan tentang:

- a. Jumlah dan nilainya
Jumlah dan nilai agunan kredit harus dapat menjamin kepentingan bank bila terjadi sesuatu kemacetan kredit sehingga jaminan tersebut, terpaksa dicairkan/ dikonversikan menjadi uang.
- b. Status kepemilikan
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Harus dengan jelas dapat diketahui bahwa jaminan tersebut benar-benar milik si penerima kredit. Bila agunan bukan milik si penerima kredit, harus ada surat kuasa atau surat pernyataan dari si pemilik untuk bersedia harta miliknya dijaminan oleh si penerima kredit kepada bank.
- c. Daya tahan dan *marketability*
Agunan kredit berupa barang, sesuai dengan umur dan teknisnya berbeda-beda dalam daya tahan dan *marketability*. Diperhatikan apakah barang-barang tersebut cepat rusak atau tahan lama, minimal selama kredit berjalan. *Marketability* adalah kekuatan barang jaminan itu untuk dijual/dipasarkan. Bila *marketability* lemah tentu nilainya akan turun terus menerus.
- d. Cara pengikatannya
Cara pengikatan barang jaminan sangat penting untuk diperhatikan oleh pejabat-pejabat bank, artinya pengikatan itu harus kuat dan benar-benar dapat menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk melindungi dana yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan oleh debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja (Kasmir, 2006:113). Adapun jaminan kredit meliputi:

- a. Kredit dengan jaminan
 - 1) Jaminan benda berwujud
Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:

- a) Tanah
 - b) Bangunan
 - c) Kendaraan bermotor
 - d) Mesin–mesin/ peralatan
 - e) Barang dagangan
 - f) Tanaman/ kebun/ sawah
 - g) Dan lainnya
- 2) Jaminan benda tidak berwujud
Yaitu benda–benda yang dapat jaminan seperti:
- a) Sertifikat saham
 - b) Sertifikat obligasi
 - c) Sertifikat tanah
 - d) Sertifikat deposito
 - e) Sertifikat tabungan yang dibekukan
 - f) Rekening giro yang dibekukan
 - g) Promes
 - h) Wesel
 - i) Dan surat tagihan lainnya
- 3) Jaminan orang
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet.
- b. Kredit tanpa jaminan
Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar–benar *bonafit* dan *professional*, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha–pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

Menurut Santoso (1997:113) kegunaan jaminan kredit antara lain:

- a. Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan, dengan menguangkan barang–barang jaminan, bilamana nasabah melakukan cedera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya (pokok maupun bunga) pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- b. Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan kredit bank, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/ proyek yang akan merugikan nasabah dapat dicegah atau diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat–syarat didalam perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.

7. Prinsip Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Penilaian kredit oleh bank dapat

dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2006:117):

- a. Kepribadian (*character*)
Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.
- b. Kemampuan (*capacity*)
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. Modal (*capital*)
Capital digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
- d. Kondisi (*condition*)
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- e. Jaminan (*collateral*)
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut (Kasmir, 2006:119):

- a. Kepribadian (*personality*)
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga

mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

- b. Penggolongan (*party*)
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. Tujuan (*perpose*)
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.
- d. Harapan (*prospect*)
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- e. Pembayaran (*payment*)
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- f. Keuntungan (*profitability*)
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. Perlindungan (*protection*)
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping prinsip 5C dan 7P, Hasibuan (2006:108) menambahkan prinsip 3R yaitu:

- a. Pengembalian (*return*)
Adalah penilaian atas yang hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjaman dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
- b. Kemampuan pengembalian (*repayment capacity*)
Adalah perhitungan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- c. Kemampuan menghadapi resiko (*risk bearing ability*)
Adalah perhitungan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil.

Disamping menggunakan penilaian dengan 5C, 7P dan 3R, prinsip-prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan usaha untuk menilai seluruh aspek yang ada. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan usaha menurut Kasmir (2003:120) meliputi :

- a. Aspek yuridis/ hukum
Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.
- b. Aspek pasar dan pemasaran
Dalam aspek ini yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan dimasa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut.
- c. Aspek keuangan
Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.
- d. Aspek teknis/ operasi
Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan *layout*, seperti kapasitas mesin yang digunakan.
- e. Aspek manajemen
Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengamalan sumber daya manusianya.
- f. Aspek sosial ekonomi
Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat.
- g. Aspek amdal
Amdal atau analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya.

8. Kebijakan Perkreditan Bank

Kebijakan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Adapun program perkreditan harus didasarkan pada beberapa asas yaitu (Hasibuan, 2006:92):

- a. Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Ketentuan Bank Indonesia.
- b. Ekonomis artinya menetapkan *rentabilitas* yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.
- c. Kehati-hatian artinya besar plafond kredit harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P dan 3R dari setiap calon peminjam.

Menurut GR. Terry dalam Hasibuan (2006:92) kebijakan (*policy*) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan

suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan.

Kebijaksanaan perkreditan antara lain:

- a. Bankable, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - 1) *Safety* yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - 2) *Effectiveness* yaitu kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana dalam bentuk investasi primer dan sekunder, kebijakan resiko, kebijakan penyebaran kredit, serta kebijakan tingkat bunga.
 - 1) *Investasi primer* yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti kantor, mesin dan ATK. Dana investasi primer harus dari mana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang. Investasi primer mutlak harus dilakukan karena merupakan motor kegiatan operasional bank.
 - 2) *Investasi sekunder* yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar *likuiditas* bank tetap terjamin.
- c. Kebijakan resiko
Kebijakan resiko maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
- d. Kebijakan penyebaran kredit
Kebijakan penyebaran kredit maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
- e. Kebijakan tingkat bunga
Kebijakan tingkat bunga maksudnya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

9. Prosedur Umum Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman

perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Kasmir (2006:123) secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas-berkas
Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.
 - 1) Pengajuan proposal hendaknya berisi:
 - a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.
 - b) Maksud dan tujuan
Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
 - c) Besarnya kredit dan jangka waktu
Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya.
 - 2) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi :
 - a) Akte notaris
 - b) T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
 - c) N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - d) Neraca dan laporan rugi laba 3(tiga) tahun terakhir
 - e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
 - f) Fotokopi sertifikat jaminan
 - 3) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:
 - a) Rasio Lancar (*current ratio*)
 - b) Rasio kecepatan (*acid test ratio*)
 - c) Tingkat perputaran persediaan (*inventory turn over*)
 - d) Rasio penerimaan penjualan(*sales to receivable ratio*)
 - e) Rasio laba bersih(*profit margin ratio*)
 - f) Pengembalian harga (*return on the worth*)
 - g) Modal perusahaan (*working capital*)
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
- c. Wawancara awal
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan

bank apakah berkas–berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga ingin mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

- d. Peninjauan lokasi (*on the spot*)
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- e. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan–kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Hasil *on the spot* dicocokkan dengan wawancara I.
- f. Keputusan kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:
 - 1) Jumlah uang yang akan diterima
 - 2) Jangka waktu kredit
 - 3) Biaya–biaya yang harus dibayar
 - 4) Waktu pencairan kredit
- g. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan; antara bank dengan debitur secara langsung dan dengan melalui notaris
- h. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat–surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- i. Penyaluran/ penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu; sekaligus atau bertahap.

10. Kolektibilitas Kredit

Menurut Suyatno (2007:123) kolektibilitas adalah “keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat–surat berharga atau penanaman lainnya”. Setiap fasilitas kredit mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran bunga dan pokok oleh debitur yang berbeda–beda atau tingkat kolektibilitas yang berbeda–beda.

Tabel 2.1
Kolektibilitas Kredit dengan Angsuran (Non-KPR)

Kol	Masa Angsuran	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Overdraif
Lancar	< 1 Bulan	< 1 bulan	< 1bulan	
	Bulanan	< 3 bulan	< 3 bulan	
	Dua Bulanan	< 3 bulan	< 3 bulan	<= 15 hari
	Tiga Bulanan	< 3 bulan	< 3 bulan	
	Empat Bulanan	<= 6 bulan	< 3 bulan	
Kurang Lancar	< 1 Bulan	> 1 bulan <= 2 bulan	> 1 bulan <= 6 bulan	
	Bulanan	> 3 bulan <= 6 bulan	> 3 bulan <= 6 bulan	
	Dua Bulanan	> 3 bulan <= 6 bulan	> 3 bulan <= 6 bulan	> 15 hari <= 30 hari
	Tiga Bulanan	> 3 bulan <= 6 bulan	> 3 bulan <= 6 bulan	
	6 Bulan <=	> 6 bulan <= 12 bulan	> 3 bulan <=6 bulan	
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak termasuk dalam kategori kolektibilitas diatas. • Kredit masih dapat diselamatkan dengan agunan bernilai 75% dari hutang peminjam (termasuk bunga). • Kredit tidak dapat diselamatkan dengan agunan bernilai minimal 100% dari hutang peminjam. 			
Macet	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dikategorikan dalam ketiga kategori diatas. • Belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan dalam jangka waktu 21 hari sejak digolongkan Kolektibilitas III. • Kredit yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau lebih diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 			

Sumber: Tjukria P. Tawaf (1999:261)

Tabel 2.2
Kolektibilitas Kredit dengan Angsuran

Uraian	Tunggakan Pokok
Lancar	Nihil atau ≤ 6 bulan
Kurang Lancar	> 6 Bulan ≤ 9 bulan
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak termasuk dalam kedua kategori Kolektibilitas diatas. • Kredit masih dapat diselamatkan dengan agunan bernilai minimal 75% dari hutang peminjam (termasuk bunga). • Kredit tidak dapat diselamatkan dengan agunan bernilai minimal 100% dari hutang peminjam.
Macet	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dikategorikan kedalam ketiga kriteria Kolektibilitas diatas. • Belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan dalam jangka waktu 21 hari sejak digolongkan Kolektibilitas III. • Kredit yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negara atau Badan Urusan Piutang Negara atau lebih diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Sumber: Tjukria P. Tawaf (1999:262)

Tabel 2.3
Kolektibilitas Kredit Tanpa Angsuran

Kol	Jangka Waktu	Tunggakan Bunga	Cerukan	Keterangan
Lancar	Belum jatuh tempo	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • ≤ 3 bulan 		
	Jatuh waktu		<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 15 hari 	Telah dianalisis untuk perpanjangan tetapi belum dapat diperpanjang karena kesulitan teknis
Kurang Lancar	Belum jatuh waktu	<ul style="list-style-type: none"> • > 3 bulan ≤ 6 bulan • Plafondering 	<ul style="list-style-type: none"> • > 5 hari ≤ 30 hari 	
	Jatuh waktu	≤ 3 bulan		
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak termasuk dalam kedua kategori kolektibilitas diatas. • Kredit masih dapat diselamatkan dengan agunan bernilai minimal 75 % dari hutang peminjam (termasuk bunga). • Kredit tidak dapat diselamatkan dengan agunan bernilai minimal 100% dari hutang peminjam. 			
Macet	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dikategorikan kedalam ketiga kriteria Kolektibilitas diatas. • Belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan jangka waktu 21 hari sejak digolongkan Kolektibilitas III. • Kredit yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 			

Sumber: Tjukria P. Tawaf (1999:262)

Table 2.4
Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas Kredit					
Kriteria	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
Pembayaran Angsuran Pokok dan/ atau Bunga	Tepat waktu	Belum melampaui 90hari	Telah melampaui 90hari	Lebih melampaui 180hari	Telah melampaui 270hari
Memiliki Mutasi Rekening	Aktif	<ul style="list-style-type: none"> • kadang-kadang terjadi cerukan • mutasi relatif aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • sering terjadi cerukan • frekwensi mutasi relatif rendah 	Terjadi cerukan yang bersifat permanen	
Jaminan	Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash Collateral)				Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar
Pelanggaran Terhadap Kontrak Yang Diperjanjikan		Jarang terjadi	Terjadi lebih dari 90 hari		
Dokumentasi Pinaman			Dokumentasi pinjaman yang lemah	Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan	

Dukungan Lain		Didukung oleh pinjaman baru			Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
Faktor Lain			Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur	<ul style="list-style-type: none"> • terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari • terjadi kapitalisasi bunga 	
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	1% x (Baki Debet Pinjaman – 100% Cash Colletaral)	5% x (Baki Debet Pinjaman – 100% Cash Colletaral)	15% x (Baki Debet Pinjaman – 100% Cash Colletaral)	50% x (Baki Debet Pinjaman – 100% Cash Colletaral)	100% x (Baki Debet Pinjaman – 100% Cash Colletaral)

Sumber: Tjukria P. Tawaf (1999:263)

Keterangan:

- a. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Pembayaran angsuran pakok dan/ bunga tepat waktu; dan
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90hari; atau
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - 3) Mutasi rekening relatif aktif; atau
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru.

- c. Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - 2) Sering terjadi cerukan; atau
 - 3) Frekwensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanent; atau
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

C. Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan Kredit

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, bank melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit, baik secara keseluruhan maupun secara individual per nasabah, apakah pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Menurut Hasibuan (2006:105) pengawasan kredit adalah "usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet". Pengawasan kredit dilakukan sebelum dan sesudah kredit dicairkan, bahkan sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur. "Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Muljono, 2001:460)".

Dengan adanya resiko yang terkandung didalam setiap pemberian kredit baik resiko bagi pemberi kredit maupun bagi pihak penerima kredit, maka dalam rangka pengamanan terhadap kredit yang disalurkan diperlukan adanya suatu aktivitas pengawasan kredit. Pelaksanaan pengawasan kredit dapat berhasil dengan baik apabila pihak bank tidak hanya bersikap menunggu karena bukan hanya nasabah yang harus selalu menghubungi bank, tetapi bank juga harus menggunakan pendekatan dua arah sehingga tercipta hubungan harmonis dengan para debiturnya yang dilandasi dengan pemikiran dan sikap saling menghormati, saling membutuhkan, dan satu sama lain mempunyai ketergantungan. Pengusaha membutuhkan kredit untuk meningkatkan usahanya, demikian juga bank membutuhkan pengusaha untuk memutarakan uangnya.

2. Tujuan Pengawasan Kredit

Menurut Muljono (2001:460) secara lebih lengkap tujuan pengawasan perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Agar penjagaan/ pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern bank/ intern bank.

- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- c. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan dan tata laksana usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- d. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas manual perkreditan surat-surat edaran dan dapat dipatuhi dan dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan menurut Hasibuan (2006:105) tujuan pengawasan kredit antara lain :

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan dalam analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi *presentase collectability credit* yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

3. Macam-macam Pengawasan Kredit

Terdapat beberapa macam pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank dalam rangka menekan terjadinya kredit bermasalah. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank dibedakan menjadi 2(dua) macam yaitu:

- a. Pengawasan aktif, dilakukan dengan pengawasan *on the spot* yaitu ditempat usaha para debitur sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul.
- b. Pengawasan pasif, dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan (dari Neraca dan Rugi/ Laba), Laporan penyaluran keuangan (dari Mutasi Rekening Pinjaman), Laporan aktivitas (dari keadaan stok dan perkembangan usaha), dan sebagainya (Sinungan, 1991:155).

Menurut Hasibuan (2006:106) pengawasan kredit dibagi menjadi 2(dua) jenis, yaitu:

- a. *Preventive Control of Credit* adalah pengembalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive credit of control* dilakukan dengan cara:
 - 1) Penetapan plafond kredit
 - 2) Pemantauan debitur
 - 3) Pembinaan debitur
- b. *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/ penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling, reconditioning, restructuring dan liquidation*.

Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat kredit diberikan tetapi juga sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur, oleh karena itu bank harus senantiasa aktif melakukan tindakan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan.

4. Teknik Pengawasan Kredit

Teknik pengawasan kredit adalah "pendekatan-pendekatan yang dipakai manajemen disuatu bank dalam melaksanakan kegiatan pengawasan (Muljono, 2001:472)". Pelaksanaan teknik pengawasan kredit haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur, dimana sebelumnya bank harus mengetahui sebab-sebab terjadinya kegagalan dalam perkreditan. Sebab-sebab terjadinya kegagalan dalam pemberian kredit dapat disebabkan berbagai masalah antara lain (Muljono, 2001:472):

- a. Masalah intern bank itu sendiri.
- b. Masalah perekonomian secara makro.
- c. Masalah-masalah yang menyangkut nasabah sendiri secara intern.

Kegagalan antara lain mungkin saja disebabkan oleh berbagai masalah secara bersamaan. Dan setelah kita mengenal sebab kegagalan pemberian kredit mulailah dicoba memilih teknik-teknik pengawasan. Teknik pengawasan kredit yang dapat digunakan adalah sebagai berikut (Muljono, 2001:479):

- a. *Verband Controle*
Verband Controle yaitu kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan-perkiraan saling berhubungan, dengan demikian jika suatu perkiraan telah dibuktikan, maka dapat digunakan untuk pembuktian perkiraan lain yang berhubungan dengan itu dan sebaliknya, jika diantara dua perkiraan saling berhubungan itu terdapat kecocokan, maka hal ini menunjukkan adanya suatu yang harus diselidiki lebih lanjut. Teknik *verband controle* merupakan salah satu cara untuk mengecek kebenaran informasi dari debitur atau untuk menguji kebenaran informasi yang mencurigakan. Teknik ini dilakukan secara tidak langsung atau tersamar dengan tujuan untuk membantu memecahkan masalah yang timbul.
- b. Pengawasan Fisik atau *Inspeksi On The Spot*
Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat perusahaan/ kegiatan usaha nasabah. Tujuan dari pengawasan fisik/ *Inspeksi On The Spot* adalah:
 - 1) Untuk mengecek kebenaran dari seluruh keterangan/ data maupun laporan oleh nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaan secara fisik.
 - 2) Secara langsung melihat/ meneliti keadaan usaha nasabah dan mengadakan wawancara/ diskusi dengan nasabah tentang seluruh aktivitas perusahaannya.

- 3) Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya. Dan juga sekaligus untuk dapat memberikan saran-saran pembinaan kepada debitur apabila ada problem-problem yang dihadapinya.
- 4) Mendidik nasabah untuk selalu menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya.

Pelaksanaan pengawasan fisik dapat dibedakan menjadi 2(dua) jenis antara lain:

1) Pengawasan fisik rutin

Pengawasan fisik rutin harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3(tiga) bulan untuk setiap nasabah tanpa kecuali. Untuk nasabah yang memperoleh kredit dalam jumlah yang relatif besar dengan resiko dan klasifikasi kredit kurang lancar/ macet, pemeriksaan secara rutin dilaksanakan sesering mungkin (sekali dalam sebulan).

2) Pengawasan *fisik insidentill* pemeriksaan mendadak

Pengawasan secara isidentil dilakukan pada setiap saat sesuai dengan kebutuhannya:

- a) Apabila mutasi R/ K (Rekening Koran) nasabah menjadi pasif.
- b) Ada T/ B atau T/ A (Tunggakan Angsuran).
- c) Adanya informasi negatif tentang nasabah dari pihak ketiga.
- d) Pada saat mengajukan permohonan perpanjangan dan/ atau tambahan kredit.
- e) Pada saat perpanjangan pertanggungan.
- f) Untuk kredit investasi pelaksanaannya dilakukan secara teratur pada setiap tahap terutama pada waktu-waktu penyelesaian jalur-jalur kritis dari rencana nasabah.

c. Monitoring Perkreditan

Monitoring perkreditan dilakukan oleh bank baik secara ekstern maupun intern. Informasi dari pihak *ekstern* dan pihak *intern* bank yang diperlukan dalam melakukan monitoring perkreditan adalah:

1) Informasi dari luar bank (*ekstern*):

- a) Meminta laporan berkala, stok, realisasi kerja dan sebagainya.
- b) Melakukan *inspeksi on the spot*
- c) Laporan akuntan, konsultan.

2) Informasi dari dalam bank (*intern*):

- a) Penelitian mutasi keuangan nasabah dalam Rekening Koran, sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat.
- b) Meneliti *turn over* dengan membandingkan debit dan kredit R/ K pada beberapa bulan berjalan.
- c) Memberi tanda pada saldo tertinggi dan terendah pada tiap periode, agar berhati-hati apabila nasabah mulai *over draft*.
- d) Mengawasi apakah pada tanggal-tanggal pelunasan dapat dipenuhi oleh nasabah.
- e) Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map kredit bermasalah.

Informasi yang diperoleh baik dari pihak intern maupun ekstern bank harus digabungkan untuk mencari persoalan pokok yang dihadapi oleh debitur. Pencarian informasi tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan langkah penanganan yang perlu diambil sehingga persoalan yang dihadapi dapat cepat diselesaikan.

5. Aspek–aspek Pengawasan Kredit

Aspek–aspek pengawasan kredit dapat digolongkan menjadi dua yaitu (Muljono:493):

- a. Pengawasan syarat–syarat materiil/ *kuantitatif* dalam pemberian kredit Bank dalam memberikan fasilitas kredit mempunyai kriteria–kriteria tertentu terhadap nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin agar tujuan pemberian kredit tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk menjamin agar tujuan pemberian fasilitas kredit dapat tercapai dengan baik dan memenuhi kriteria:
 - 1) Nasabah dapat membayar kembali/ pelunasan utang pokok dan dengan bunga serta lain–lain kewajiban kepada bank sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan.
 - 2) Nasabah dapat mengembangkan usahanya setelah menerima kredit, maka syarat–syarat formal/ *kuantitatif/ prosedural* tersebut diatas harus diimbangi dengan dipenuhinya syarat–syarat *materiil/ kuantitatif* dalam pemberian kredit.

Dalam pemberian kredit harus diperhatikan tentang syarat–syarat *materiil* dan *formil* yang telah ditetapkan oleh masing–masing bank. Informasi yang diperoleh harus dapat diuji kebenarannya, objektif dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Adapun syarat–syarat *materiil* yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Jumlah plafond, maksimum yang diberikan
 - 2) Jaminan perkreditan
 - 3) Akta–akta pendirian dan perubahan badan usaha nasabah
 - 4) Self financing dan setoran jaminan
 - 5) Laporan kegiatan nasabah
 - 6) *Audit report public accountant*
 - 7) *Term of references* penyusunan *feasibility study* untuk kredit investasi
 - 8) Aspek–aspek lain yang perlu diperhatikan dalam analisa perkreditan
- Syarat syarat *materiil* mutlak dipenuhi karena mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan pemberian kredit yaitu perhitungan besar kecil yang akan diberikan.
- b. Pengawasan Administrasi Perkreditan
Pengawasan administratif bertujuan untuk memastikan kebenaran dan ketelitian data administratif. Keuntungan dari pengawasan administrasi perkreditan yaitu:

- 1) Dari data administratif akan dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan operasional yang terjadi.
- 2) Dari data administratif akan merupakan umpan balik bagi manajemen untuk penentuan kebijakan (*policy*) di kemudian hari.

Untuk keperluan pengawasan kredit, lingkup kegiatan pengawasan administrasi dibagi dalam 2(dua) kelompok, yaitu:

- 1) Kegiatan administrasi nasabah secara individual yang antara lain meliputi:
 - a) Laporan kegiatan nasabah
 - b) Prima nota debitur/ mutasi Rekening Koran
 - c) Buku debitur
 - d) Arsip map-map debitur
- 2) Kegiatan nasabah secara keseluruhan:
 - a) Tingkat *colectibility*
 - b) Laporan perkreditan
 - c) Pendapatan perkreditan
 - d) Data pembukuan
 - e) Asuransi perkreditan

D. Modal Kerja

Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, perusahaan membutuhkan adanya modal. Modal tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, seperti pengadaan bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Dalam hal modal tersebut perusahaan sering mengalami kesulitan atau kekurangan sehingga dapat menghambat kelancaran usaha. Oleh karena itu pihak perusahaan membutuhkan adanya tambahan modal yang salah satunya bisa diperoleh dari pinjaman bank berupa kredit modal kerja.

Kredit modal kerja yaitu "kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya". Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan (Kasmir 2002:77). Pengertian kredit modal kerja adalah "kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar". Tujuan kredit untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif (Suyatno, 2003:28).

Adapun penggolongan kredit modal kerja adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I dengan suku bunga 9% setahun, adalah kredit modal kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras/ gabah/ padi dan jagung untuk BUUD/ KUD.
- b. Golongan II dengan suku bunga 12% pertahun adalah sebagai berikut:
 - 1) Kredit untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka Bimas dan Inmas.
 - 2) Kredit pengumpulan dan penyaluran garam rakyat oleh BUUD/ KUD dan PN. Garam serta kredit modal kerja PT. Garam.
 - 3) Kredit modal kerja pabrik terigu.
 - 4) Kredit ekspor dan produsen eksportir.
 - 5) Kredit produksi, impor dan penyaluran pupuk dan obat hama.
 - 6) Kredit impor dan penyaluran barang-barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri.
 - 7) Kredit modal kerja untuk pengumpulan dan penyaluran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan oleh BUUD/ KUD.
 - 8) Kredit modal kerja untuk usaha pertanian rakyat dan kerajinan rakyat.
 - 9) Kredit modal kerja untuk pemeliharaan ternak unggas dan perikanan rakyat.
- c. Golongan III dengan suku bunga 13,5% setahun adalah:
 - 1) Kredit modal kerja untuk industri dan jasa-jasa; penggilingan padi atau huter, gula, minyak kelapa, tekstil, alat-alat pertanian, kertas, semen, pengangkutan umum, percetakan dan penerbitan, pariwisata.
 - 2) Kredit modal kerja untuk produksi lainnya.
 - 3) Kredit impor dan penyaluran barang-barang yang diawasi.
 - 4) Kredit untuk pembiayaan persediaan gula.
 - 5) Kredit perdagangan dalam negeri termasuk antar pulau.
 - 6) Kredit modal kerja kontraktor untuk proyek DIK, INPRES yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah serta perumahan sederhana.
- d. Golongan IV dengan suku bunga 15% setahun, adalah kredit modal kerja untuk kontraktor lainnya yang tidak termasuk butir (3f) diatas.
- e. Golongan V dengan suku bunga 18% setahun, adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam butir (2e), (2f) dan (2c).
- f. Golongan VI dengan suku bunga 21% setahun, adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam angka (I) sampai dengan (5) (Suyatno, 2003:28).

E. Tunggakan Kredit

1. Pengertian Tunggakan Kredit

Bagaimanapun sehatnya kebijaksanaan kredit dan berapapun sistematisnya analisis terhadap semua permohonan kredit, namun beberapa kredit yang diberikan bank tidak dapat tidak menjadi menunggak. Betapapun telitinya perencanaan oleh peminjam dan seksamanya penelitian oleh para pejabat kredit, namun tidak dapat menghilangkan semua ketidakpastian dari situasi ini. Menurut

Hasibuan (2002:15) tunggakan kredit adalah "kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur bersangkutan".

2. Penyebab Tunggakan Kredit

Sinungan (1991:167) menyatakan bahwa penyebab dari kesulitan–kesulitan keuangan perusahaan yang mengakibatkan suatu tunggakan kredit dapat dibagi dalam 2(dua) kategori:

- a. Managerial faktor:
 - 1) Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan.
 - 2) Tidak efektifnya pengawasan atas biaya–biaya/ ongkos–ongkos perusahaan.
 - 3) Kebijakan tentang piutang yang tidak efektif.
 - 4) Terlalu banyak penempatan pada aktiva tetap.
 - 5) Permodalan yang tidak cukup.
- b. Faktor–faktor ekstern:
 - 1) Bencana alam.
 - 2) Peperangan.
 - 3) Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan.
 - 4) Perubahan–perubahan teknologi.

Menurut Kasmir (2006:128) tunggakan suatu kredit disebabkan oleh 2(dua) unsur sebagai berikut:

- a. Dari pihak perbankan
Artinya dalam melakukan analisis, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal–akalan.
- b. Dari pihak nasabah
Dari pihak nasabah tunggakan kredit dapat dilakukan akibat 2(dua) hal yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.

3. Tindakan Penyelamatan Kredit

Dalam tunggakan kredit pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja

lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami tunggakan kredit sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Kasmir (2006:129) menyatakan bahwa penyelamatan terhadap tunggakan kredit dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. *Rescheduling*
Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dimana debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit.
- b. *Reconditioning*
Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
 - 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
 - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - 3) Penurunan suku bunga
Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
 - 4) Pembebasan suku bunga
Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- c. *Restructuring*
Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:
 - 1) Dengan menambah jumlah kredit
 - 2) Dengan menambah *equity*:
 - a) dengan menyetor uang tunai
 - b) tambahan dari pemilik
- d. Kombinasi
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.
- e. Penyitaan jaminan
Penyitaan jaminan merupakan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang–hutangnya.

Menurut Sinungan (1991:174) dalam melakukan penyelesaian penyelesaian kredit cara yang ditempuh bank berupa:

- a. Keringanan–keringanan bunga dan angsuran
- b. Bantuan injeksi kredit
- c. Penyelesaian melalui saluran hukum
- d. Penghapusan kredit



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2007:3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan dalam Denzin dan Loncoln dalam Maleong (2007:5) menyatakan penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai macam metode”. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang akan dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi atau tindakan secara historik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode alamiah.

Menurut Nazir (2003:54) metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Studi kasus atau penelitian kasus (*case study*) adalah “penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan *personality*”. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan pengawasan kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung, prosedur pengawasan kredit, tunggakan kredit, memberikan solusi yang dapat digunakan meningkatkan pengawasan kredit dan untuk menekan tunggakan kredit.

B. Fokus Penelitian

Perlunya fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam penelitian, sehingga objek yang akan diteliti tidak akan terlalu luas. Berdasar latar belakang metode seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Analisis tunggakan kredit modal kerja yang terjadi selama 3(tiga) periode berdasarkan jumlah debitur dan tunggakan kredit yang disalurkan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung dalam menekan tunggakan kredit.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk tempat penelitian adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro No. 2B Tulungagung. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian pada bagian kredit dan pada bagian pengawasan kredit.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer
Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti. Sumber data yang berkepentingan adalah bagian perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung.
2. Sumber Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau dari sumber pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari profil perusahaan, struktur organisasi, peraturan pemerintah dan karya tulis yang berhubungan dengan perkreditan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam penelitian, karena kegiatan pengumpulan data akan diperoleh dari data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih lanjut. Dalam menyusun skripsi data yang dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu data atau informasi yang diinginkan dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak responden yang terkait dengan objek penelitian, yaitu pimpinan, bagian perkreditan dan pengawasan.

2. Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen perusahaan seperti profil perusahaan dan struktur organisasi, peraturan pemerintah serta karya tulis yang berhubungan dengan pengawasan perkreditan.

3. Observasi atau Pengamatan

Adalah metode dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan pengawasan kredit.

F. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan metode pengumpulan data, maka instrument penelitian yang digunakan adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan pada saat wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi yang digunakan adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan dan dokumentasi catatan-catatan yang terkait dengan pemberian kredit, pengawasan kredit dan tunggakan kredit.

G. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi yang berguna. Tujuan analisis data didalam penelitian adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dengan demikian analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian,

karena dalam melakukan analisis tersebut maka akan berarti dan akan dapat memecahkan sebagian atau seluruh masalah penelitian:

1. Analisis Struktur Organisasi

Menjabarkan bentuk struktur organisasi yang berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing fungsi dalam organisasi perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat diketahui *job description* dari masing-masing bagian.

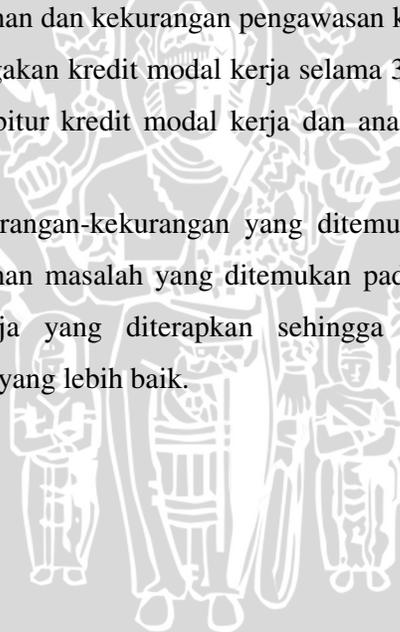
2. Menganalisis pengawasan kredit modal kerja.

Menggambarkan pengawasan yang dilakukan oleh bank dalam pemberian kredit baik dalam pemberian prosedur kredit, pengawasan yang dilakukan pada saat kredit diberikan, pengawasan pada saat penggunaan kredit oleh nasabah dan pengawasan pada saat kredit itu setelah dicairkan.

3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pengawasan kredit modal kerja.

4. Menganalisis tunggakan kredit modal kerja selama 3(tiga) periode, berupa analisis jumlah debitur kredit modal kerja dan analisis tunggakan kredit yang disalurkan.

5. Menganalisis kekurangan-kekurangan yang ditemukan dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang ditemukan pada sistem pengawasan kredit modal kerja yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan pengawasan kredit yang lebih baik.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). BRI berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi 2(dua) Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21

tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% di tangan Pemerintah.

2. Lokasi Penelitian

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung berlokasi di JL. Pangeran Diponegoro No. 2B. Pemilihan lokasi berdasarkan letak yang strategis sehingga memudahkan komunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang berdekatan, antarlain beberapa sekolah, pusat perbelanjaan, instansi pemerintah dan bank lainnya.

3. Visi dan Misi

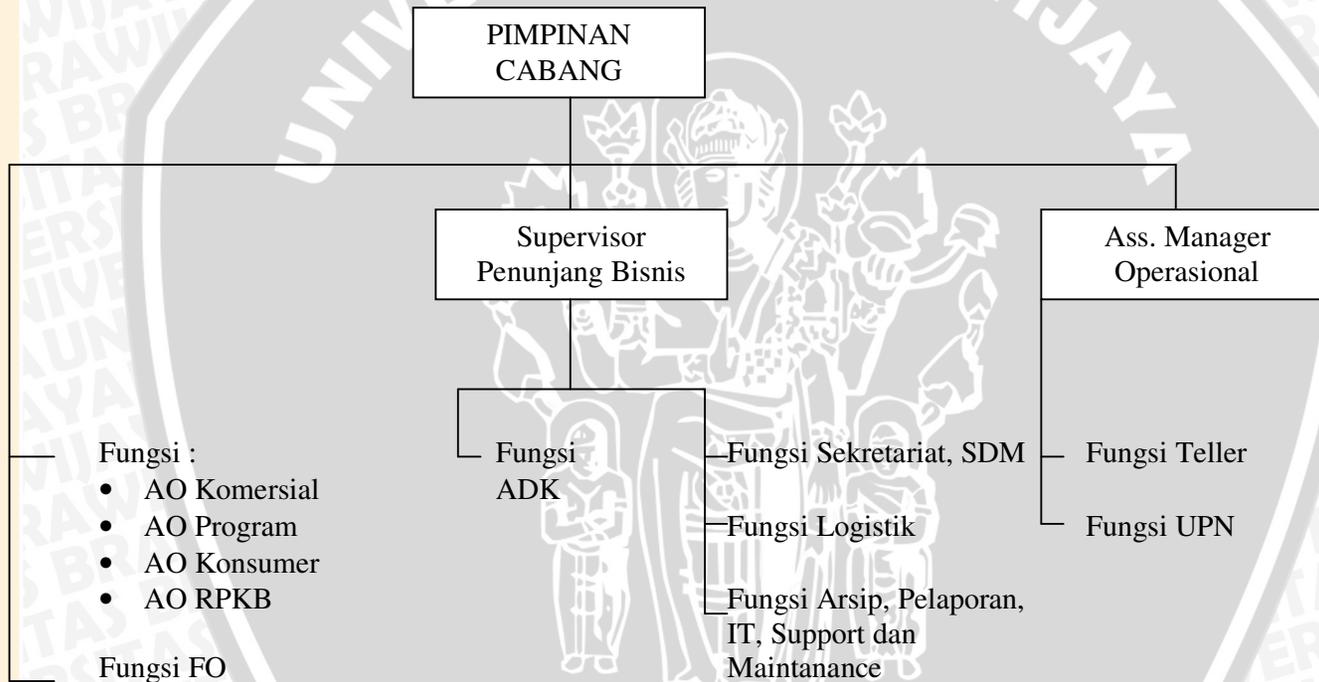
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung mempunyai visi dan misi perusahaan. Adapun visi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah “menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah” dan misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah:

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah untuk menunjang ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerjasama yang tersebar luas dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANCA POLA MINIMAL



Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung

a. Pimpinan Cabang

- 1) Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.
- 2) Membina dan mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- 3) Memfungsikan semua unit kerja dibawahnya dan pekerja binaannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya.
- 4) Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan kegiatan pemasaran dana, jasa serta kredit dalam rangka memperluas pangsa pasar.
- 6) Melakukan pembinaan dan hubungan dengan nasabah penyimpanan dan peminjam Kanca dan unit kerja dibawahnya, baik nasabah kerjasama maupun individual untuk meningkatkan keuntungan yang maksimal.
- 7) Mengidentifikasi potensi ekonomi diwilayah kerjanya sehingga dapat mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Nasabah yang dapat diterima (KND) Kanca.
- 8) Menjamin Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) dilaksanakan secara benar dan konsisten untuk mencapai keuntungan yang optimal dan resiko sekecil-kecilnya serta menciptakan pelayanan prima.
- 9) Mengembangkan bisnis perkreditan di Kanca guna memperoleh keuntungan/ penghasilan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima dan tetap mempertahankan kualitas portofolio yang sehat.
- 10) Memantau keragaan portofolio kredit dan menetapkan tindak lanjutnya agar tercapai kualitas portofolio kredit yang berkembang, sehat dan menguntungkan.

- 11) Melaksanakan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait atas pelaksanaan bisnis Kanca dan unit kerja dibawahnya untuk menjamin pelayanan perbankan yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Berdasarkan petunjuk dari Grup Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (grup RPKB) Kanwil, membentuk Tim Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (*Remedial Account Management*) dan bertindak sebagai ketua tim di Kanca dalam rangka meminimalisir tingkat kerugian Kanca dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Mengadakan identifikasi masalah dan membuat usul penyelesaian atas kredit bermasalah di Kanca.
 - b. Memberikan masukan/ rekomendasi kepada pejabat yang berwenang tentang rencana-rencana penyehatan dan atau penyelamatan kredit bermasalah di Kanca.
 - c. Mengawasi ketertiban administrasi dan kelengkapan berkas/ dokumen atas seluruh kredit bermasalah di Kanca.
 - d. Membuat usulan untuk penyelesaian kredit bermasalah termasuk penyelesaian melalui pihak ketiga.
- 13) Membina dan mengawasi kegiatan operasional di Kanca dan unit kerja di bawahnya agar sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan guna memuaskan kepentingan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.
- 14) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui/ disahkan telah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah.
- 15) Menjamin pengelolaan kas dan surat berharga telah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin keamanan dan kepastiannya secara optimal.
- 16) Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pekerja di Kanca guna meningkatkan kualitas setiap fungsi yang ada yaitu fungsi pemasaran, operasional dan penunjang.
- 17) Melakukan pembinaan guna meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan sikap perilaku kerja/ kompetensi (termasuk penilaian kerja, pemberian *reward* dan *punishment*) terhadap seluruh pekerja di Kanca dan pekerja Unit kerja yang menjadi bawahannya.

- 18) Melaksanakan fungsi manajemen Sumber Daya Manusia sesuai wewenangnya dalam rangka menyediakan Sumber Daya Manusia yang professional.
- 19) Menjamin terlaksananya pelayanan administrasi Kanca dan unit-unit kerja dibawahnya sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran operasional dan menjaga kepentingan bank.
- 20) Menjamin daftar *user* sesuai dengan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas dan tanggungnya sesuai dengan kewenangan.
- 21) Memeriksa kelengkapan surat pernyataan merahasiakan *password* untuk semua *user* komputer guna menghindari penyalahgunaan wewenang.
- 22) Melayani seluruh kebutuhan Kanca dan unit-unit kerja dibawahnya serta unit kerja lainnya sebagai *internal costumer* dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memperlancar kegiatan bank (misalnya dalam hal tambahan/ setoran kas, penerus nota-nota, penerusan dan penerimaan transfer keluar/ masuk, dan sebagainya).
- 23) Menjamin ketepatan dan kebenaran pembukuan dan laporan guna menyajikan data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen (Kantor Pusat/ Kantor Wilayah).
- 24) Melaksanakan waskat terhadap seluruh kegiatan di Kanca dalam rangka menjamin keabsahannya dan memastikan waskat pada unit-unit kerja dibawahnya telah dijalankan sesuai ketentuan.
- 25) Menindak lanjuti temuan-temuan audit baik dari pihak internal maupun eksternal BRI, untuk memperbaiki kesalahan/ kekeliruan sehingga terwujud bank yang aman, terarah dan menghasilkan.
- 26) Memeriksa ketertiban dan kebenaran pemeliharaankerjaan pengelolaan kas dan surat berharga untuk menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.
- 27) Memeriksa nota pembukuan transaksi Kas antar unit kerja guna menjamin keabsahan dan kebenarannya.

- 28) Memastikan bahwa calon nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, agar memperoleh nasabah yang baik dan tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia.
- 29) Memastikan media hasil *back up* data harian dan penyimpanannya sesuai ketentuan agar terjamin keamanan dan kerahasiannya.
- 30) Memeriksa hasil laporan-laporan yang wajib dicetak dan penyimpanannya.
- 31) Mengelola dan mengawasi kebutuhan logistik agar dicapai tingkat efisiensi yang optimal dan menghasilkan.
- 32) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung bisnis Kanca.

b. Supervisor Penunjang Bisnis

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit di Kantor Cabang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengamankan kepentingan bank.
- 2) Memastikan bahwa ketaatan terhadap Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) BRI dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) untuk setiap permohonan kredit telah dilaksanakan dengan memberikan pendapat/ opini bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan (KUP) BRI dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) serta kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi untuk menjamin keamanan bank.
- 3) Memastikan bahwa perjanjian kredit telah dibuat sesuai dengan Putusan Kredit (PTK) dalam rangka mengamankan kepentingan bank.
- 4) Membantu melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) ditingkat kantor Cabang dalam rangka memproses pemberian kredit yang sehat.
- 5) Memastikan bahwa aspek yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi BRI guna mengamankan kepentingan bank.
- 6) Mengawasi pemeliharaan file pekerja secara tertib dalam rangka pembinaan pekerja yang profesional serta terealisasinya kesejahteraan pegawai.

- 7) Membina dan menilai pekerjaan semua personil yang menjadi bawahannya dalam rangka menyediakan SDM yang profesional.
- 8) Mengawasi ketertiban administrasi semua aktiva tetap Kantor Cabang untuk mengamankan asset bank.

c. Fungsi Administrasi Kredit (ADK)

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan kredit sesuai dengan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD) dan Kriteria Nasabah yang dapat Diterima (KND) guna menjamin pinjaman yang sehat, menghasilkan dan menguntungkan.
- 2) Mengadministrasikan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD), Kriteria Nasabah yang dapat Diterima (KND), RPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan informasi kepada pejabat kredit lini.
- 3) Menyiapkan dan mengisi formulir Pengawasan/ Koordinator Administrasi Kredit (ADK) atas setiap permohonan kredit dalam rangka monitoring penyelesaian pemberian kredit oleh pejabat kredit lini.
- 4) Menyiapkan kredit yang akan jatuh tempo 3(tiga) bulan yang akan datang dan melaporkannya kepada atasannya guna menjadi informasi pejabat kredit lini memproses perpanjangan kredit yang akan jatuh tempo.
- 5) Memeliharakerjakan berkas pinjaman dengan tertib/ aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan Bank.
- 6) Memeliharakerjakan dokumentasi asuransi kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa yang berkaitan dengan kredit sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan kepentingan Bank.
- 7) Menyiapkan dokumen kredit yang telah jatuh tempo (*expired*) untuk segera diperbaharui/ diperpanjang dalam rangka mengamankan kepentingan Bank.
- 8) Mengidentifikasi dokumen kredit yang harus segera dipenuhi oleh nasabah atas Putusan Penundaan Dokumen (PPND) guna mengamankan kepentingan Bank.

- 9) Menyiapkan perjanjian kredit dibawah tangan guna mengamankan kepentingan Bank.
- 10) Menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pembuatan perjanjian kredit notariil dalam rangka mengamankan kepentingan Bank.
- 11) Menyiapkan Instruksi Perncairan Kredit (IPK) untuk melaksanakan putusan kredit dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta menjaga kepentingan Bank.
- 12) Membantu nasabah dalam menyiapkan tanda setoran biaya dalam rangka realisasi kredit untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
- 13) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit yang akan dicairkan dalam rangka kelancaran pelayanan nasabah dan menjaga kepentingan Bank.
- 14) Menindaklanjuti semua temuan audit, baik dari *intern* maupun *ekstern* BRI yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk mengurangi resiko kerugian bagi Bank.
- 15) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberi atasan dalam angka menunjang bisnis Kanca.
- 16) Memelihara kerjaan register dan dokumen yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- 17) Menyiapkan data-data untuk pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) dan mengirim sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 18) Membuat/ mengirim laporan sesuai dengan bidang tugasnya secara benar dan mengirim tepat waktu.

d. Fungsi Account Officer (AO)

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Memeriksa kelengkapan dan meminta nasabah untuk melengkapi persyaratan kredit.
- 2) Melakukan pemeriksaan usaha nasabah secara administrasi dan lapangan.
- 3) Bertindak sebagai pemrakarsa kredit.
- 4) Bertindak sebagai Pejabat perekomendasi untuk kredit yang diprakarsai AO lainnya.
- 5) Memutus kredit sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pinca.

- 6) Melaksanakan *Judgement* yang mandiri sesuai dengan wewenang yang diberikan Pinca.
- 7) Melakukan Negosiasi dengan debitur dalam rangka pemberian, penyelamatan dan penyelesaian kredit.

e. Fungsi Sekretariat

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Mencatat semua surat masuk dan surat keluar dalam agenda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan *internal consumer* meliputi unit kerja dibawah Kanca dan unit kerja lainnya serta pihak ketiga lainnya.
- 2) Mendistribusikan semua surat-surat masuk kepada para pejabat yang berwenang di Kanca dan Unit kerja dibawahnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Kanca.
- 3) Menyiapkan surat keluar untuk diserahkan kepada petugas ekspedisi dalam rangka penyampaian informasi pada unit kerja lainnya maupun kepada nasabah.
- 4) Mengatur agenda kerja Pemimpin Cabang dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pinca.
- 5) Menyiapkan konsep dan mengetik surat sesuai permintaan atasannya dalam rangka pelaksanaan tugas Kanca.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan untuk mendukung Bisnis Kanca.
- 7) Menindak lanjuti temuan audit, baik dari *intern* maupun *ekstern* BRI khususnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk mengurangi resiko Bank.
- 8) Memeliharakerjakan seluruh arsip surat-surat secara tertib dan rapi.

f. Fungsi SDM

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Memeliharakerjakan file pekerja.
- 2) Meneruskan usulan dari atasan pekerja yang berkaitan dengan kepegawaian dan kesejahteraan pekerja.

- 3) Memeliharakerjakan register-register dan dokumen yang berkaitan dengan bidang SDM.
- 4) Melakukan edit data-data SDM kedalam SAP SIM-SDM.

g. Fungsi Logistik

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Menyiapkan kebutuhan logistik untuk masing-masing fungsi baik di Kanca maupun di BRI Unit.
- 2) Membuat nota pembukuan atas setiap transaksi keuangan yang terkait dengan bidang logistik, meliputi; transaksi pembukuan pembebanan *droping* barang dari Kanwil, transaksi pembukuan pembebanan biaya-biaya (Percetakan, Suplies, dan biaya perbaikan).
- 3) Memeliharakerjakan register aktiva maupun register lainnya yang berkaitan dengan logistik.
- 4) Menyiapkan semua bentuk laporan yang berkaitan dengan bidang logistik.
- 5) Menerima dan melaporkan ke Kanwil setelah menerima *droping* barang-barang investasi.
- 6) Memastikan bahwa semua aktiva tetap baik di Kanca maupun Unit telah ditambahkan/ diperbarui (*Up-Load*).

h. Ass. Manager Operasional

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi dalam kurun waktu setelah *close system* sampai dengan awal hari.
- 2) Memastikan bahwa semua pegawai dibawahnya telah siap ditempatnya masing-masing dan melaksanakan *flogoperasional* (mengaktifkan atau menonaktifkan terminal *user*).
- 3) Mengesahkan dalam *On Line System Informasi Bank* (OLSIB) yang menandatangani kas/ bukti transaksi tunai, *kliring*, dan pemindah bukuan yang ada dalam batas wewenangnya.
- 4) Mengesahkan data status dan mengaktifkan rekening pinjaman dan rekening peserta *Phone Banking*.
- 5) Melakukan konfirmasi atas *transfer* masuk ke Kantor Cabang lain sesuai ketentuan.

- 6) Memastikan kebenaran pembuatan/ penerimaan dokumen/ nota yang berkaitan dengan pelayanan dana dan jasa (termasuk devisa).
- 7) Memastikan kebenaran pembuatan laporan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 8) Memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

i. Fungsi Teller

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Melakukan Tambahan Kas teller.
- 2) Menerima dan membayar sejumlah uang dari/ke nasabah sesuai dengan tanda setoran/ kuitansi
- 3) Melaksanakan fungsi *chequer* atas transaksi diatas batas wewenangnnya.
- 4) Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi pembayaran tunai yang ada dalam batas wewenangnnya.
- 5) Melakukan *entry* pembukuan O/B kedalam sistem
- 6) Memeliharakerjakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

j. Fungsi UPN

Tugas dan Tanggung jawab

- 1) Memberikan informasi kepada calon nasabah/ nasabah mengenai produk dana dan jasa BRI.
- 2) Memberikan informasi saldo simpanan, transfer, maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan.
- 3) Melayani permintaan salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan (diluar pengiriman secara rutin).
- 4) Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan (seperti mengantarkan/ mengambil uang ketempat tinggal/ usaha nasabah).
- 5) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa BRI.
- 6) Menerima dan menginventarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

5. Produk dan Jasa Pelayanan Bank Rakyat Indonesia

Adapun produk-produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Britama
Adalah tabungan BRI yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekwensi maupun jumlahnya selama saldo mencukupi.
- b. Britama Dollar
Merupakan simpanan dalam mata uang US Dollar yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekwensi maupun jumlahnya (sesuai ketentuan).
- c. Tabungan Simpedes BRI
Adalah simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekwensi maupun jumlahnya selama saldo mencukupi.
- d. Depobri Rupiah
Adalah simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh BRI dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- e. Depobri Valas
Merupakan simpanan pihak ketiga berupa deposito dalam mata uang asing yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu sebagaimana telah diperjanjikan antara Deposan dengan BRI.
- f. Tabungan Haji BRI
Adalah tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- g. GIROBRI Rupiah
Merupakan simpanan pihak ketiga dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan warkat cek/ bilyet giro atau surat perintah penarikan lainnya.
- h. GIROBRI Valas
Merupakan simpanan dalam valuta asing pihak ketiga pada BRI yang setiap saat dapat diambil alih oleh pemegang rekening yang bersangkutan.

- i. Safe Deposit Box
Adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan didalam ruang khasanah untuk menjamin keamanannya.
- j. Kartu Debit BRI
Adalah kartu plastik dengan *magnetic stripe* untuk melakukan transaksi penarikan tunai mesin ATM dengan menggunakan PIN dan melakukan transaksi belanja melalui EDC (*Electronic Draft Captured*) dengan menggunakan PIN ataupun tanda tangan.
- k. Fasilitas ATM dan Kartu BRI
ATM (Anjungan Telepon Mandiri) adalah alat/ mesin yang berfungsi untuk melayani transaksi perbankan, baik tunai (penarikan uang) atau transfer perbankan lainnya yang non tunai sesuai keinginan nasabah.
- l. Kartu BRI
Kartu BRI adalah kartu plastik dari jenis *magnetic stripe* yang dikeluarkan oleh BRI untuk nasabah atas tabungannya guna menarik uang tunai, informasi saldo, dan transaksi perbankan lainnya melalui mesin ATM.
- m. Fasilitas Phone Banking BRI (Call BRI)
Phone Banking adalah salah satu *delivery channel* perbankan (*e-banking delivery channel*) yang melayani transaksi perbankan dimana instruksi transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui telepon.
- n. Kartu Kredit BRI/ Master Card
Adalah jenis kartu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembelian.
- o. Western Union
Adalah salah satu jenis jasa pengiriman uang di BRI dari dan keluar negeri dengan aman dan cepat menggunakan jaringan *Western Union*. Nasabah yang biasa menggunakan layanan ini antara lain keluarga TKI dan TKI, WNA yang bekerja di Indonesia, kepentingan bisnis, turis asing dan kepentingan darurat/ *emergency*.

Adapun jenis kredit yang ada dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Kredit Investasi

Merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modal selain tanah yang tercermin dalam aktiva tetap perusahaan (kecuali untuk pembelian toko, kantor, pabrik yang telah siap dipakai tanah dan bangunannya merupakan satu kesatuan).

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlukan pemohon. Jenis kredit konsumtif yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah:

1) Kretap (Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap)

Merupakan kredit yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah (BUMN, BUMD, TNI, Polri) dan swasta yang telah diangkat sebagai pegawai tetap.

2) Kresun (Kredit Kepada Pensiun)

Merupakan kredit gadai pensiun untuk para pensiunan sipil dan ABRI atau janda/ dudanya baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

3) KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

Merupakan kredit yang digunakan untuk membeli rumah baru atau lama.

4) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor)

Merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membeli kendaraan bermotor yang terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua.

c. Kredit Komersial Kepada Koperasi

Adalah kredit modal kerja atau investasi yang diberikan kepada koperasi untuk usaha produktif dan simpan pinjam.

d. Kredit Program P4K

Adalah kredit dalam proyek pembinaan peningkatan pendapatan-pendapatan petani nelayan kecil dan untuk usaha produktif.

e. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Adalah kredit investasi atau kredit modal kerja yang diberikan kepada petani, peternak, dan nelayan melalui kelompok tani atau koperasi.

f. Kredit dengan *Cash Collateral*

Merupakan kredit dengan agunan uang seperti menganggunkan Depobri yang dimiliki debitur.

g. Kredit Modal Kerja

Merupakan fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan untuk menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin sehari-hari perusahaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Adapun jenis Kredit Modal Kerja adalah sebagai berikut:

1) Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE)

Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada eksportir atau pemasok yang menyediakan untuk membiayai kegiatan produksi pengumpulan dan atau pentimpanan barang dalam rangka ekspor.

2) Kredit Modal Kerja Import (KMKI)

Merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai seluruh atau sebagian dalam rangka import barang, khususnya berhubungan dengan L/C import.

3) Kredit Modal Kerja Lokal (KMKL)

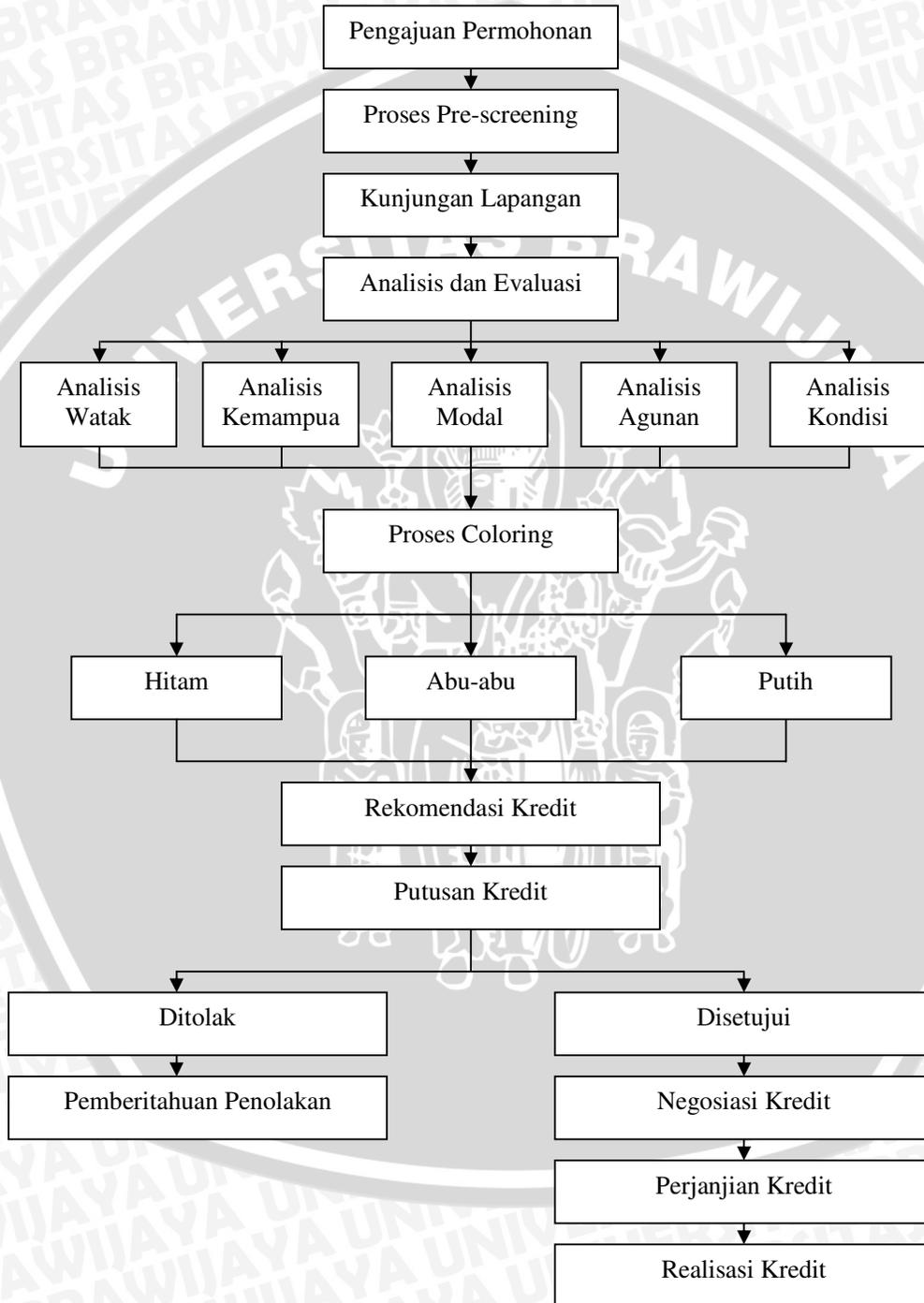
Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pemohon sebagai tambahan modal kerja untuk membiayai usahanya keluar ekspor dan import.

B. Penyajian Data

1. Prosedur Pemberian Kredit

Adapun prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung secara garis besar adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung



Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung

- a. Nasabah atau calon debitur datang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung dengan membawa surat atau proposal permohonan kredit secara tertulis disertai dengan syarat-syarat pengajuan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung.
- b. Nasabah kemudian diterima oleh Administrasi Kredit (ADK) untuk diperiksa kelengkapan persyaratan kredit yang dibawa oleh calon debitur tersebut. Apabila berkas pengajuan kredit yang diminta oleh bank kurang lengkap maka calon debitur diminta untuk segera melengkapi.
- c. Setelah itu surat permohonan tersebut akan diserahkan Administrasi Kredit (ADK) kepada Pimpinan Cabang untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya Pinca disposisi kepada Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan melanjutkan disposisi ke Administrasi Kredit (ADK).
- d. Kemudian bagian Administrasi Kredit (ADK) menyiapkan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) dan mengisikan keterangan sesuai dengan yang tertera dalam proposal permohonan dari calon nasabah. Dalam SKPP dilampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan antara lain:
 - 1) Identitas Pemohon (KTP, Kartu Keluarga)
 - 2) Akte Pendirian Badan Usaha Usaha/ TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - 4) SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan)
 - 5) SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
 - 6) Surat bukti kepemilikan Agunan
 - 7) Proposal singkat permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur
Laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir
- e. Setelah Administrasi Kredit (ADK) membuat Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) maka permohonan tersebut dicatat dalam buku Register Permohonan Kredit Kanca (RKPP).
- f. Setelah semua kelengkapan calon nasabah dinyatakan memenuhi syarat maka Administrasi Kredit (ADK) menyerahkan berkas tersebut kepada *Account Officer* (AO) untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- g. Tahap selanjutnya adalah proses *pre-screening* atau tahap penilaian awal oleh *Account Officer* (AO). Penilaian yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) meliputi penetapan Pasar Sasaran (PS), pengecekan Kriteria Resiko yang Diterima (KDR) yaitu untuk memastikan bahwa calon debitur tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Indonesia dan tidak termasuk dalam daftar usaha yang dilarang.
- h. Selanjutnya dilakukan peninjauan ke lokasi (*on the spot*) oleh *Account Officer* (AO). Tujuan dari peninjauan lokasi (*on the spot*) adalah untuk meninjau secara langsung keadaan usaha, kelangsungan usaha serta agunan dari nasabah yang bersangkutan. Harga dari agunan harus lebih dari pinjaman sehingga apabila terjadi permasalahan yang berupa kredit macet maka nilai agunan dapat digunakan untuk menutupi jumlah pinjaman. *Account Officer* (AO) meninjau lokasi yang kemudian menuangkan hasil kunjungan tersebut kedalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- i. Data dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut kemudian akan dianalisis dan dievaluasi. Analisis bertujuan untuk menentukan besarnya resiko bisnis dan resiko agunan. Hasil analisis dan evaluasi kredit kemudian dituangkan dalam *Credit Risk Rating* (CRR) dan Memorandum Analisis Kredit (MAK). Adapun analisis resiko bisnis dan resiko agunan dilakukan berdasarkan prinsip 5C kredit yaitu:
- 1) Analisis Watak
Analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:
 - a). Reputasi bisnis/ reputasi perusahaan.
 - b). Riwayat perusahaan.
 - c). Catatan kriminal.
 - d). Riwayat hidup dan atau riwayat pernikahan.
 - e). Gaya hidup.
 - f). Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan.

- g). Tingkat hubungan/ kerjasama dengan BRI.
- h). Kecenderungan berbisnis.
- i). Budaya perusahaan.
- j). Legalitas usaha pemohon.
- k). Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya.
- l). Informasi Bank BI, rekan bisnis, pesaing.
- m). Catatan Intern BRI.

2) Analisis Kemampuan

Analisis kemampuan bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon. Analisis kemampuan meliputi:

a). Aspek manajemen

Adalah kemampuan pengelolaan perusahaan antara lain: kemampuan menetapkan visi dan misi dalam berusaha, kemampuan menterjemahkan visi dan misi dalam sasaran-sasaran spesifik kemampuan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan kemampuan menerapkan strategi secara efektif dan efisien, kemampuan melakukan evaluasi dan pengendalian.

b). Aspek produksi

Aspek produksi bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemohon antara lain: kemampuan pemohon memproduksi (untuk industri) atau mengadakan (dalam hal usaha perdagangan) produk/barangnya, yang tercermin dari kemampuan daya saing produk yang dihasilkan/ diperdagangkan, kemampuan pemohon untuk berproduksi/ berdagang secara berkesinambungan dan bagaimana proses produksi, bagaimana pengadaan bahan baku, lokasi pabrik, pengendalian persediaan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

c). Aspek pemasaran

Tujuan analisis terhadap aspek pemasaran adalah untuk menilai kemampuan pemohon dalam memasarkan produknya. Analisis aspek pemasaran dilakukan dengan memperhatikan hal-

hal antara lain sebagai berikut: angka keragaman masa lalu yang dilihat dari data statistik penjualan, tingkat persaingan dan angka proyeksi pemasaran pada masa mendatang yang meliputi perencanaan dan strategi pemasaran yang akan dilakukan.

d). Aspek personalia

Analisis aspek personalia bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas perusahaan dan memelihara hubungan baik antara tenaga kerja dengan perusahaan/ pemilik perusahaan. Analisis aspek personalia meliputi: jumlah tenaga kerja (harian, tetap), organisasi kerja, tingkat keahlian manajer dan tenaga pelaksana dan gaya manajemen; agresif, konservatif (bagi perusahaan keluarga; bagaimana hubungan internal keluarga, resiko key person; usia, kesehatan, pewarisan).

e). Aspek Finansial

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aspek finansial antara lain: Laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah secara berkala, Laporan keuangan yang dipergunakan sebagai dasar analisis pemberian kredit dapat berupa laporan keuangan yang telah diaudit atau belum diaudit tergantung pada pertimbangan Pejabat Kredit Lini, Laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis adalah laporan keuangan minimal 2(dua) periode terakhir. Laporan keuangan periode terakhir adalah maksimum 3(tiga) bulan sebelum bulan penganjuan.

3) Analisis Modal

Tujuan analisis modal adalah mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya. Adapun analisis modal meliputi:

- a). Besar dan komposisi modal sebagaimana dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
- b). Perkembangan profitabilitas usaha selama minimal 2(dua) periode terakhir. Tinggi rendahnya profitabilitas mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan pemupukan modal sendiri dari laba.
- c). Angka DER harus dianalisis lebih lanjut dengan melihat komposisi hutang yang ada, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.
- d). Bagi pengusaha yang telah menjual sahamnya dipasar modal (*go public*) agar diteliti pula perkembangan nilai sahamnya.

4) Analisis Kondisi

Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hanya dibiayai, harus dilakukan analisis terhadap kondisi makro usaha/ industri sejenis.

5) Analisis Agunan Kredit

Agunan merupakan sumber pelunasan terakhir apabila kredit bermasalah. Analisis agunan kredit meliputi:

- a). Agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank. Agunan dapat berupa barang proyek atau hak tagihan.
 - b). Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk dalam batasan pengertian proyek atau hak tagih.
 - c). Agunan kredit konsumsi adalah pengembalian kredit bersumber pada gaji, gaji pensiun, penghasilan lain, maupun aktiva tetap lainnya
- j. Setelah tahap analisis dan evaluasi maka dilakukan proses *colouring* yaitu pemberian putusan warna kredit. Berdasarkan analisis dan evaluasi maka warna kredt di BRI dibagi menjadi 3(tiga) macam, yaitu:

1) Warna Hitam

Klasifikasinya adalah :

- a). Tujuan pembiayaan kredit termasuk dalam hal yang dilarang oleh Undang-Undang Perbankan dan peraturan Bank Indonesia.

- b). Dalam segi finansial tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran dan bunga kredit.
 - c). Total skor CRR > 31.
 - d). Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 90hari.
- 2) Warna Abu-abu
- Klasifikasinya adalah:
- a). Tidak memenuhi klasifikasi hitam.
 - b). Total skor CRR lebih besar dari 26 dan maksimal 31.
 - c). Terdapat tunggakan pokok lebih dari atau bunga lebih dari 30hari dan kurang dari atau sama dengan 90hari.
- 3) Warna Putih
- Klasifikasinya adalah:
- a). Tujuan pembiayaan kredit tidak termasuk dalam hal yang dilarang oleh Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia.
 - b). Dalam segi finansial mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran dan bunga kredit.
 - c). Tidak terdapat tunggakan pokok.
 - d). Tidak termasuk dalam klasifikasi warna abu-abu dan hitam.
- k. Setelah terdapat putusan kredit maka *Account Officer* (AO) membuat rekomendasi kredit, yang kemudian diberikan kepada Pejabat Pemutus Kredit Yaitu Pimpinan Cabang (Pinca). Rekomendasi kredit berupa struktur, tipe dan syarat kredit.
- l. Untuk kredit yang termasuk dalam klasifikasi warna hitam masih bisa ditingkatkan ke klasifikasi warna abu-abu melalui putusan *up-grading*. Apabila Pinca disetujui menjadi klasifikasi warna abu-abu maka dapat diteruskan proses kreditnya. Tetapi apabila ditolak maka proses kredit tersebut tidak dapat dilanjutkan.
- m. Untuk putusan ditolak Administrasi Kredit (ADK) mencatat putusan dalam buku Register Permohonan Kredit Kanca (RPKK) yang kemudian menyiapkan pemberitahuan ditolak kepada nasabah disertai alasan penolakan. Apabila putusan tersebut disetujui maka Administrasi Kredit (ADK) mencatat putusan tersebut dalam buku Register Permohonan

Kredit Kanca (RPKK) yang kemudian disiapkan Surat Penawaran Putusan kredit (*Offering Letter*).

- n. Nasabah diberikan waktu sampai dengan 14hari untuk mempertimbangkan putusan penawaran kredit yang diberikan. Jika pemohon menyetujui persyaratan yang tercantum dalam *Offering Letter*, maka nasabah wajib menandatangani diatas materai dan mengembalikan SKPP sebelum jangka waktu berakhir.
- o. Setelah nasabah menyetujui, menandatangani dan mengembalikan *Offering Letter* maka Administrasi Kredit (ADK) menyiapkan surat Perjanjian Kredit dan pengikat agunan. Akte perjanjian tersebut dibuat oleh notaris, yang mana ditandatangani diatas materai dan dilakukan dihadapan Administrasi Kredit (ADK) dan Pimpinan Cabang (Pinca).
- p. Setelah penandatanganan perjanjian kredit, maka Administrasi Kredit (ADK) membuat Surat Instruksi Pencairan Kredit (IPK) yang kemudian diserahkan kepada Pimpinan Cabang (Pinca) untuk diperiksa. Apabila Pimpinan Cabang (Pinca) menyetujui maka akan segera ditandatangani oleh Pimpinan Cabang (Pinca).
- q. Nasabah dapat melakukan pencairan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pencairan tersebut bisa dilakukan secara langsung ataupun bertahap sesuai dengan keinginan nasabah.

2. Data Tunggakan Kredit

Kegiatan pengawasan kredit berkaitan erat dengan resiko yang dapat ditimbulkan oleh pemberian kredit. Salah satu resiko yang mungkin timbul akibat pemberian kredit adalah adanya kredit macet atau kredit bermasalah. Apabila pengawasan dilakukan dengan baik dan memperhatikan aspek-aspek pengawasan yang ada maka timbulnya kredit macet atau kredit bermasalah yang diindikasikan dengan tunggakan kredit dapat ditekan seminimal mungkin. Berikut perincian dari Kolektibilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung selama 3(tiga) periode yaitu periode 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1

Laporan Kolektibilitas Kredit Modal Kerja (KMK)
 Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007

Tahun	Lancar (L)		Dalam Perhatian Khusus (DPK)		Kurang Lancar (KL)		Diragukan (D)		Macet (M)		Total Kredit Modal Kerja	
	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)
2005	5660	197.928.032	202	3.246.763	48	3.320.624	47	520.482	397	12.876.737	6354	217.892.638
2006	5608	216.805.014	192	22.832.314	24	1.095.889	33	656.383	349	13.708.492	6206	255.098.092
2007	4848	261.379.838	355	27.255.526	53	2.999.524	64	1.453.222	374	15.029.823	5694	308.117.933

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung

Tabel 4.1 merupakan data jumlah Kredit Modal Kerja (KMK) yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia selama 3(tiga) tahun berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Data kolektibilitas kredit modal kerja (KMK) yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung terbagi dalam 5(lima) golongan yaitu Lancar(L), Dalam Perhatian Khusus(DPK), Kurang Lancar(KL), Diragukan(D) dan Macet(M).

Berdasar data yang terdapat pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah Kredit Modal Kerja(KMK) yang disalurkan dari tahun 2005 sampai dengan 2007 mengalami peningkatan, begitu juga dengan jumlah debitur yang mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja(KMK) tersebut. Pada tahun 2005 jumlah Kredit Modal Kerja(KMK) yang disalurkan sebesar Rp217.892.638,00 dengan jumlah debitur 5.560 orang. Tahun 2006, kredit modal kerja(KMK) yang disalurkan meningkat menjadi Rp255.098.092,00 dengan jumlah debitur 6.206 orang. Pada tahun 2007, jumlah Kredit Modal Kerja (KMK) yang disalurkan Rp308.117.933,00 dengan jumlah debitur 5.694 orang.

Data selanjutnya adalah data jumlah tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK) selama 3(tiga) tahun pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Tunggakan yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung termasuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar(KL), Diragukan(D) dan Macet(M).

TABEL 4.2

LAPORAN TUNGGAKAN KREDIT MODAL KERJA (KMK)

Periode 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2007

Tahun	Kurang Lancar (KL)		Diragukan (D)		Macet (M)		Total KMK	
	Debitur	Jumlah (Rp)	Debitur	Jumlah (Rp)	Debitur	Jumlah (Rp)	Debitur	Jumlah (Rp)
2005	48	3.320.624	47	520.482	397	12.876.737	492	16.717.843
2006	24	1.095.889	33	656.383	349	13.708.492	406	15.460.764
2007	53	2.999.524	64	1.453.222	374	15.029.823	491	19.482.569

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 dan tahun 2007 terjadi peningkatan pemberian kredit modal kerja (KMK) baik jumlah nominal maupun jumlah debitur, sedangkan pada tahun 2006 terjadi penurunan dalam pemberian kredit modal kerja (KMK) dalam jumlah nominal dan juga jumlah debiturnya. Jumlah terbesar debitur yang mengalami penunggakan ada pada kolektibilitas macet, dimana keadaan ini sangat membahayakan karena keadaan ini lebih berat dihadapi dibandingkan dengan kolektibilitas Kurang lancar (KL) dan Diragukan (D).

Data tentang jumlah tunggakan kredit modal kerja (KMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung dapat diketahui berdasarkan jenis kredit dapat diketahui dari Laporan Account Officer (AO). Adapun Laporan Account Officer periode 31 Desember 2005 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung dapat diketahui pada table 4.3.



Tabel 4.3

Laporan Kolektibilitas Tunggal Kredit Modal Kerja (KMK)

Berdasarkan Laporan Account Officer (AO)

Periode 31 Desember 2005

NO	Jenis Kredit	JENIS KOLEKTIBILITAS						Total (K+D+M)	
		Kurang Lancar (KL)		Diragukan (D)		Macet (M)		Deb	Jumlah (Rp)
		Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)		
1.	Kredit Komersial	4	3.058.599	0	0	6	711.866	10	3.770.465
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredit Tapsun	17	180.919	14	135.137	147	1.043.848	178	1.359.904
4.	Kredit KKB	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	0	0	4	280.008	8	1.036.917	12	1.316.925
6.	Kredit Chanelling	0	0	0	0	107	9.639.166	107	9.639.166
7.	Kredit P4K	27	81.106	29	105.337	129	444.940	185	631.383
8.	Kredit KP6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	48	3.320.624	47	520.482	397	12.876.737	492	16.717.843

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 tunggakan tertinggi berada pada Kredit Channeling yaitu sebesar Rp9.639.166,00 dengan perincian yaitu 107 orang debitur pada kolektibilitas kredit macet, kemudian kredit Komersial dengan jumlah tunggakan Rp3.770.465,00 dengan perincian 4 orang debitur pada kolektibitas kurang lancar(KL) dengan jumlah Rp3.058.599,00 , 6 orang debitur pada kolektibilitas macet(M) dengan jumlah Rp711.866,00. Kredit Tapsun dengan jumlah tunggakan sebesar Rp1.359.904,00 dengan perincian 17 orang debitur pada kolektibilitas kurang lancar(KL) dengan jumlah Rp180.919,00 , 14 orang debitur pada kolektibilitas diragukan(D), dan 147 orang debitur pada kolektibilitas macet(M) dengan jumlah Rp1.043.848,00. Kredit excecuting dengan jumlah tunggakan Rp1.316.925,00 dengan perincian 4 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 280.008,00 , 8 orang debitur pada kilektibilitas macet (M) sebesar Rp 1.036.917,00 , kemudian kredit P4K dengan jumlah tunggakan Rp 631.383,00 dengan perincian 27 orang debitur pada kolektibilitas kurang lancar (KL) sebesar Rp 81.106,00 , 29 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 105.337,00 pada kolektibilitas diragukan (D) dan 129 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 444.940,00.



Tabel 4.4

Laporan Kolektibilitas Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK)
Berdasarkan Laporan Account Officer (AO)
Periode 31 Desember 2006

NO	Jenis Kredit	JENIS KOLEKTIBILITAS						Total (K+D+M)	
		Kurang Lancar (KL)		Diragukan (D)		Macet (M)		Deb	Jumlah (Rp)
		Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)		
1.	Kredit Komersial	2	875.000	3	205.960	11	1.047.470	16	2.128.430
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredit Tapsun	10	79.825	17	208.521	121	966.714	148	1.225.060
4.	Kredit KKB	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	0	0	2	161.817	20	1.587.646	22	1.746.463
6.	Kredit Chanelling	0	0	0	0	107	9.670.815	107	9.670.815
7.	Kredit P4K	12	141.064	11	80.085	90	435.847	113	659.996
8.	Kredit KP6	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		24	1.095.889	33	656.383	349	13.708.492	406	15.460.764

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tungagung

Pada data jumlah tunggakan kredit modal kerja (KMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung periode 31 Desember 2006 menunjukkan pemberian kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp15.460.764,00. Tunggakan kredit modal kerja (KMK) tertinggi pada Kredit Channeling dengan jumlah tunggakan Rp 9.670.815,00 dengan perincian 107 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M). Kemudian Kredit Komersial dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 2.128.430,00 dengan perincian 2 orang nasabah pada kolektibilitas kurang lancar (KL) sebesar Rp 875.000,00 , 3 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 205.960,00 , dan 11 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 1.047.470,00. Kredit Exchuting dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 1.746.463,00 dengan perincian 2 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 161.817,00 dan 20 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 1.587.646,00. Pada Kredit Tapsun jumlah tunggakan kredit sebesar RP 1.225.060,00 dengan perincian 10 orang nasabah pada kolektibilitas kurang lancar (KL) sebesar Rp 79.825,00 , 17 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 208.521,00 dan 121 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 966.714,00. Sedangkan Kredit P4K dengan jumlah tunggakan kredit sebesar Rp 659.996,00 dengan perincian 12 orang nasabah pada kolektibilitas kurang lancar (KL) sebesar Rp 141.064,00 , 11 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 80.085,00 dan 90 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 435.847,00.

Tabel 4.5

Laporan Kolektibilitas Tunggal Kredit Modal Kerja (KMK)

Berdasarkan Laporan Account Officer (AO)

Periode 31 Desember 2007

N O	Jenis Kredit	JENIS KOLEKTIBILITAS						Total (K+D+M)	
		Kurang Lancar (KL)		Diragukan (D)		Macet (M)		Deb	Jumlah (Rp)
		Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)	Deb	Jumlah (Rp)		
1.	Kredit Komersial	16	2.471.518	6	924.166	10	1.959.951	32	5.355.635
2.	kredit Pegawai BRI	15	310.413	12	96.591	35	325.285	62	732.289
3.	Kredit Tapsun	11	149.341	16	167.599	67	479.758	94	796.698
4.	Kredit KKB	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	11	68.252	27	168.900	134	1.101.897	172	1.339.049
6.	Kredit Chanelling	0	0	0	0	107	9.670.815	107	9.670.815
7.	Kredit P4K	0	0	3	95.966	21	1.492.117	24	1.588.083
8.	Kredit KP6	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		53	2.999.524	64	1.453.222	374	15.029.823	491	19.482.569

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung

Data jumlah tunggakan kredit modal kerja (KMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung dapat dilihat pada tabel 4.5 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar Rp 19.482.569,00. Dimana jumlah kolektibilitas tertinggi ada pada Kredit Channeling dengan jumlah tunggakan Rp 9.670.815,00 dengan perincian 107 nasabah pada kolektibilitas macet (M) Selanjutnya Kredit Komersial dengan jumlah tunggakan Rp 5.355.635,00 dengan perincian 16 orang nasabah pada kolektibilitas kurang lancar (KL) dengan jumlah Rp 2.471.518,00 , 6 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 924.166,00 , dan 10 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 1.959.951,00. Kredit P4K dengan jumlah tunggakan Rp 1.588.083,00 dengan perincian 3 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 95.966,00 dan 21 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 1.492.117,00 , kemudian Kredit Excheuting dengan jumlah tunggakan kredit sebesar Rp 1.339.049,00 dengan perincian 11 orang nasabah pada kolektibilitas kurang lancar (KL) sebesar Rp 68.252,00 , 27 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 168.900,00 , dan 134 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 1.101.897,00.

Kredit Tapsun dengan jumlah tunggakan kredit sebesar Rp 796.698,00 dengan perincian 11 orang nasabah pada kolektibilitas kurang lancar (KL) sebesar Rp 149.341,00 , 16 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) sebesar Rp 167.599,00 , dan 67 nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 497.758,00. Selanjutnya Kredit Pegawai BRI dengan jumlah tunggakan kredit sebesar Rp 732.289,00 dengan perincian 15 orang nasabah pada kolektibilitas kurang lancar (KL) sebesar Rp 310.413,00 , 12 orang nasabah pada kolektibilitas diragukan (D) Rp 96.591,00 dan 35 orang nasabah pada kolektibilitas macet (M) sebesar Rp 325.285,00.

Berdasarkan data kolektibilitas kredit modal kerja (KMK) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung yang terdapat pada tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan juga penurunan dalam jumlah kredit modal kerja (KMK) yang disalurkan maupun jumlah tunggakan nasabah pada periode 31 Desember 2005 sampai dengan

periode 31 Desember 2007. Setiap ditemukan gejala-gejala yang dapat menyebabkan kredit bermasalah, maka pejabat kredit harus mengambil langkah-langkah pemecahan sebelum penyaluran kredit menjadi lebih buruk dan memperkuat posisi Bank.

3. Pengawasan Kredit Modal Kerja

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungung dapat dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu:

1) Pengawasan secara langsung

Diartikan sebagai pengawasan atau pemantauan yang langsung berhubungan dengan subjek hukum dan objek hukum yang dalam perjanjian kredit yaitu debitur dan usaha debitur dan jaminan atau agunan. Adapun tujuan diadakannya pengawasan langsung:

- a). Untuk mengetahui secara langsung kondisi dan keadaan nasabah, maka Account Officer (AO) yang menangani, guna mengadakan pengecekan ketempat usaha nasabah.
- b). Memberikan saran-saran yang diperlukan yang menyangkut problematik nasabah dalam rangka pengembangan usaha yang bersangkutan atau pendekatan secara persuasif.
- c). Untuk mengetahui sampai sejauh mana kebenaran fasilitas kredit tersebut digunakan sebagaimana mestinya.
- d). Telephon call dilaksanakan disamping untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab disamping untuk mengetahui perkembangan usaha yang bersangkutan.

2) Pengawasan tidak langsung

Diartikan sebagai pengawasan dan pemantauan yang tidak langsung yang berhubungan dengan subjek hukum maupun objek hukum, yang dalam perjanjian kredit pemantauan dilaksanakan melalui alat-alat bantu seperti rasio-rasio keuangan, dan melalui rekening koran nasabah. Adapun cara-cara Bank Rakyat Indonesia (Persero) didalam melaksanakan pengawasan tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a). Memonitoring terhadap rekening nasabah yang bersangkutan.

- b). Mengikuti perkembangan usaha nasabah melalui laporan-laporan yang disampaikan, baik atas permintaan nasabah maupun tidak.
- c). Mengadakan review terhadap file-file kredit secara periodik.
- d). Mengikuti perkembangan debitur dalam membayar bunga pinjaman dan mengingatkan debitur pada waktu jatuh tempo pinjaman.

Program pembinaan debitur merupakan bagian dari manajemen kredit, dilakukan dan dituangkan dalam laporan tertulis yang kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Cabang. Tujuan pembinaan debitur adalah agar dapat meminimumkan resiko kerugian kredit. Pengawasan kredit selain bersifat preventif juga mengandung tindakan represif yaitu untuk menyelamatkan kemungkinan yang lebih besar. Tindakan penyelamatan kredit disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan debitur serta seberapa berat permasalahan yang dihadapi. Bentuk tindakan penyelamatan kredit dapat berupa Rescheduling, Reconditioning dan Restrukturing. Tindakan penyelamatan ditangani oleh Account Officer(AO) dimana dengan persetujuan dan pengesahan dari Pimpinan Cabang.

Pengawasan kredit dilakukan agar setiap fasilitas kredit yang diberikan dapat berjalan dengan baik, tidak bermasalah dan melakukan rencana-rencana penyelesaian sebelum kredit macet dan tidak tertagih. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Pelaksanaan Pengawasan Kredit

PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Cabang Tulungagung

Jenis Pengawasan	Dilakukan oleh	Keterangan
I. Pengawasan Langsung		
1. inspeksi on the spot		3 bulan
a. rutin	AO	
b. insidental	AO	
2. telephone call	AO	
3. pemantauan jaminan	ADK	Insidental
4. pembinaan nasabah berupa pemberian saran-saran yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.	AO	Insidental
II. Pengawasann tidak Langsung		
1. monitoring rekening nasabah	AO	1 bulan
2. monitoring laporan keuangann nasabah	AO	3bulan
3. reviuw terhadap file-file kredit.	AO/ADK	3bulan

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan rerangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tugas harus secara jelas dan tepat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Tujuan pemisahan tugas adalah untuk mencegah dan mendeteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang.

Struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung masih memiliki kelemahan pada sistem pengawasan dan pemberian kredit, khususnya pada bagian:

a. Account Officer(AO)

Tugas dan wewenang AO dalam proses pemberian kredit lebih dominan, dimana AO lebih banyak mengoperasionalkan proses pemberian kredit mulai kredit diajukan sampai dengan kredit tersebut dicairkan. Adapun kelemahan AO pada saat pemberian kredit yaitu:

- 1) Tidak adanya bukti yang diterima oleh nasabah setelah memasukkan surat permohonan kredit.
- 2) Tidak adanya arsip terhadap hasil wawancara dan daftar dokumen pinjaman.
- 3) Tidak melakukan registrasi permohonan kredit.
- 4) Adanya jumlah sumber daya manusia untuk bagian *Account Officer* (AO) dalam BRI yang kurang memadai.

Adapun upaya untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan tersebut yaitu:

- 1) Membuat tanda terima atas permohonan kredit dan berkas-berkas yang diserahkan kepada nasabah.
- 2) Melakukan pengarsipan terhadap hasil wawancara data dan membuat daftar pinjaman.
- 3) Melakukan registrasi terhadap permohonan kredit.

4) Agar jumlah sumber daya manusia untuk bagian Account Officer (AO) lebih diperbanyak sesuai dengan jumlah debitur.

b. Administrasi Kredit (ADK)

Tugas dan wewenang pada bagian ADK dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik yaitu:

1) Bagian Legal

Bagian petugas bank yang bertindak dari segi hukum terhadap segala hal perkreditan. Adapun fungsinya:

- a). Menganalisis keabsahan surat-surat yang berhubungan dengan subjek hukum seperti SIUP dan surat-surat lainnya.
- b). Pengikatan jaminan bank, baik jaminan barang bergerak maupun tidak bergerak.

2) Bagian Credit Investigasi

Bagian petugas bank yang bertugas untuk mencari segala informasi yang diperlukan mengenai calon debitur, untuk mengetahui apakah debitur layak diberikan kredit atau tidak.

3) Bagian Kredit Jaminan

Bagian petugas bank yang mempunyai fungsi khusus untuk mengamankan asset bank dalam bentuk kredit.

2. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

Pemberian kredit merupakan awal proses kredit yang menentukan baik buruknya debitur untuk mendapatkan kredit. Setelah mengetahui gambaran pemberian kredit maka ada beberapa usulan perbaikan yang diajukan adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Pengajuan Kredit

Adapun tahapan dalam pengajuan kredit yaitu:

Tahap Pengajuan kredit

- 1) Sebelum mengajukan surat permohonan sebaiknya nasabah melengkapi semua persyaratan, agar permohonan dapat berjalan lancar.
- 2) Mengisi sendiri SKPP dan diserahkan bersama lampiran syarat-syarat yang telah ditentukan. SKPP dibuat rangkap 2(dua) yaitu:

- Lembar 1 : sebagai arsip ADK
Lembar 2 : sebagai arsip AO
- 3) Nasabah mengajukan permohonan kepada ADK dengan membawa semua kelengkapan persyaratan pengajuan kredit.
 - 4) ADK melakukan wawancara mengenai tujuan dan kegunaan dari kredit yang diambil.
 - 5) ADK memeriksa kelengkapan persyaratan dan pengisian SKPP apabila persyaratan lengkap, maka pasti bisa dilanjutkan. Jika persyaratan belum lengkap maka ADK meminta nasabah untuk melengkapi dengan memberikan batas waktu pelengkapan.
 - 6) Setelah itu, ADK membuat Bukti Pengajuan Permohonan Kredit (BPPK). Dimana BPPK digunakan sebagai bukti bahwa nasabah telah diterima oleh ADK serta nasabah menyerahkan surat-surat berharga ADK untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi. BPPK dibuat rangkap 3(tiga) yaitu:
Lembar 1 : untuk arsip nasabah
Lembar 2 : sebagai arsip ADK
Lampir 3 : sebagai lampiran AO
 - 7) Kemudian ADK melakukan registrasi permohonan yang masuk kedalam buku RPKK.

Tahap Analisis

- 1) ADK memberikan informasi mengenai calon nasabah dan juga SKPP beserta syarat-syarat lainnya untuk dianalisis oleh *Account Officer* (AO).
- 2) *Account Officer* mengadakan analisis dan evaluasi data yang diperoleh dengan melakukan kunjungan lapangan (*survey*) kelokasi nasabah. Dari hasil *survey Account Officer* membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). LKN dibuat rangkap 4(empat) yaitu:
Lembar 1 : sebagai arsip ADK
Lembar 2 : sebagai arsip AO
Lembar 3 : sebagai arsip nasabah
Lembar 4 : sebagai arsip Pinca

- 3) Supervisor Penunjang Bisnis melakukan *survey* ulang, menganalisis berdasarkan laporan *Account Officer* dan membuat CRR yang menghasilkan warna kredit. CRR dibuat rangkap 2(dua) yaitu:

Lembar 1: sebagai arsip ADK

Lembar 2: sebagai arsip AO

- 4) Kredit dengan warna hitam akan dilakukan proses *up-grading* ke Kanwil untuk dilakukan penolakan atau persetujuan kredit. Apabila proses *up-grading* disetujui maka kredit akan diteruskan dengan warna abu-abu.

- 5) Untuk kredit dengan warna putih dan abu-abu akan diteruskan dengan pembuatan MAK. MAK dibuat rangkap 2(dua) yaitu:

Lembar 1 : sebagai arsip ADK

Lembar 2 : sebagai arsip AO

Rekomendasi dan Putusan Kredit

- 1) Berdasarkan hasil MAK maka SPB akan merekomendasikan untuk mendapatkan putusan kepada Pinca.
- 2) Kemudian Pinca akan menerbitkan Putusan Kredit (PTK) untuk memberikan putusan penolakan atau persetujuan permohonan kredit yang diberikan nasabah.
- 3) Untuk kredit yang sudah mendapatkan putusan maka ADK akan mencatatnya dalam RPKK.
- 4) Apabila putusan ditolak, maka Pinca akan menandatangani Surat Penolakan Kredit yang didalamnya juga berisi alasan penolakan dan ADK akan mengirimkannya kepada debitur.
- 5) Untuk keputusan yang disetujui ADK akan melanjutkan kredit dan menerima paket kredit.
- 6) Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket Kredit (FPKP) yang disertai opini ADK. Formulir FPKP dibuat rangkap 2(dua):

Lembar 1: sebagai arsip ADK

Lembar 2: sebagai arsip AO

Tahap Negosiasi Tahap

- 1) Setelah memeriksa kelengkapan paket kredit, ADK membuat surat penawaran putusan kredit (*OL*) yang ditandatangani bersama Pinca.
- 2) Kemudian SPKK diberikan kepada debitur untuk dipertimbangkan melakukan negosiasi apakah nasabah menyetujui atau menolak.
- 3) Apabila debitur setuju akan persyaratan yang ada pada SPKK maka nasabah akan menandatangani dan mengembalikan kembali SPKK tersebut.

Perjanjian Kredit

- 1) Setelah menandatangani SPKK, nasabah menyetujui maka ADK akan membuat surat perjanjian kredit yang akan dibuat dihadapan notaris atau dibawah tangan oleh Bank Rakyat Indonesia sendiri. Surat perjanjian dibuat rangkap 3(tiga) yaitu:

Lembar 1 : untuk nasabah

Lembar 2 : untuk ADK

Lembar 3 : untuk AO

- 2) Surat perjanjian kredit ditandatangani oleh Pinca, ADK dan nasabah.

b. Prosedur Pencairan Kredit

- 1) Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, maka ADK membuat surat Instruksi Pencairan Kredit (IPK) yang diserahkan kepada Pinca dan SPB untuk diperiksa.
- 2) Apabila Pinca dan SPB setuju akan ditandatangani oleh keduanya.
- 3) Setelah disetujui dan ditandatangani, ADK melalui persetujuan SPB akan membuat rekening untuk nasabah dan aktivitas nasabah.
- 4) Kemudian SPB melakukan *over booking* (O/B) atau pemindahbukuan jumlah plafond kredit dalam rekening kedalam rekening nasabah.
- 5) Penarikan/ pencairan kredit dapat dilakukan nasabah sesuai dengan perjanjian, baik memakai cek maupun tunai.

c. Prosedur Pembayaran Kredit

Prosedur pembayaran kredit dapat dilakukan melalui teller maupun ATM.

Pembayaran melalui Teller:

- 1) Nasabah datang ke Kanca, kemudian mengisi slip penyetoran sesuai dengan nama, nomer rekening, jumlah agunan yang harus dibayar kemudian ditandatangani.
- 2) Nasabah menyerahkan slip, buku tabungan dan uang angsuran kepada Teller.
- 3) Teller kemudian memeriksa uang dan slip setoran, kemudian membubuhkan tanda tangan. Setelah itu, teller memasukkan data pembayaran kepada rekening nasabah.

Pembayaran melalui ATM

- 1) Nasabah datang ke ATM BRI, kemudian melakukan transaksi dengan memilih menu pembayaran yang ada pada monitor BRI.
- 2) Nasabah mentransfer sejumlah uang yang digunakan untuk membayar angsuran dan bunga, kemudian mendapatkan struk pembayaran.
- 3) Struk transfer pembayaran tersebut akan dijadikan bukti pembayaran.

3. Analisis Tunggakan Kredit

Analisis tunggakan kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap jumlah debitur dan jumlah kredit yang disalurkan. Analisis terhadap jumlah debitur dilakukan untuk mengetahui seberapa besar prosentase(%) kredit yang telah tersalurkan kepada masyarakat.

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa tunggakan Kredit Modal Kerja(KMK) pada tahun 2005 dan 2007 terlihat adanya kecenderungan naik untuk kategori Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).

Perhitungan Prosentase (%) Jumlah Debitur Kredit Modal Kerja

Apabila dilihat dari prosentase (%) jumlah debitur Kredit Modal Kerja (KMK) Periode 31 Desember 2005 terlihat sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL) :

$$\text{a. Tahun 2005} = \frac{48}{6354} \times 100\%$$

$$= 0,7556\%$$

$$\text{b. Tahun 2006} = \frac{24}{6206} \times 100\%$$

$$= 0,3867\%$$

$$\begin{aligned} \text{c. Tahun 2007} &= \frac{53}{5694} \times 100\% \\ &= 0,9308\% \end{aligned}$$

Diragukan(D) :

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2005} &= \frac{47}{6354} \times 100\% \\ &= 0,7396\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Tahun 2006} &= \frac{33}{6206} \times 100\% \\ &= 0,5317\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Tahun 2007} &= \frac{64}{5694} \times 100\% \\ &= 1,1239\% \end{aligned}$$

Macet (M) :

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2005} &= \frac{397}{6354} \times 100\% \\ &= 6,2480\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Tahun 2006} &= \frac{349}{6206} \times 100\% \\ &= 5,6235\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Tahun 2007} &= \frac{374}{5694} \times 100\% \\ &= 6,5683\% \end{aligned}$$

Total Kredit Modal Kerja (KMK)

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2005} &= \frac{492}{6354} \times 100\% \\ &= 7,7431\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Tahun 2006} &= \frac{406}{6206} \times 100\% \\ &= 6,5420\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Tahun 2007} &= \frac{491}{5694} \times 100\% \\ &= 8,6231\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil prosentase(%) perhitungan jumlah kredit modal kerja(KMK) pada periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 dapat diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori kurang lancar(KL) tahun 2005 sebanyak 0,7554%; kemudian mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 0,3867%; dan tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 0,9308%. Pada kategori diragukan(D) prosentase(%) debitur pada tahun 2005 sebanyak 0,7396%; kemudian mengalami penurunan jumlah debitur tahun 2006 menjadi 0,5317%; dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan debitur menjadi 1,1239%. Sedangkan pada kategori Macet(M) pada tahun 2005 sebesar 6,2480%; mengalami penurunan jumlah debitur tahun 2006 menjadi 5,6235%; dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 6,5783%.

Adapun rincian hasil prosentase(%) jumlah debitur kredit modal kerja(KMK) periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Prosentase (%) Debitur Kredit Modal Kerja
Periode 31 Desember 2005 s/d Periode 31 Desember 2007

Tahun	Jumlah Debitur			Total Debitur	Prosentase (%)			Total (%)
	Kurang Lancar (KL)	Diragkan (D)	Macet (M)		Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	
2005	48	47	397	492	0,7554	0,7396	6,2480	7,7431
2006	24	33	349	406	0,3867	0,5317	5,6235	6,5420
2007	53	64	374	491	0,9308	1,1239	6,5235	8,6231

Sumber: data diolah

Apabila dilihat berdasarkan data jumlah tunggakan kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung terdapat 8(delapan) jenis kredit modal kerja yaitu:

1. Kredit Komersial
2. Kredit Pegawai BRI
3. Kredit Tapsun
4. Kredit KKB
5. Kredit Exchuting
6. Kredit Channeling
7. Kredit P4K
8. Kredit KPK

Adapun prosentase(%) debitur kredit modal kerja dilihat berdasarkan jenis kredit yang diberikan untuk Periode 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL) :

a. Kredit komersial $= \frac{4}{6354} \times 100\%$
 $= 0,0629\%$

b. Kredit Tapsun $= \frac{17}{6354} \times 100\%$
 $= 0,2675\%$

c. Kredit P4K $= \frac{27}{6354} \times 100\%$
 $= 0,4249\%$

Diragukan (D) :

a. Kredit Tapsun $= \frac{14}{6354} \times 100\%$
 $= 0,2203\%$

b. Kredit Exchuting $= \frac{4}{6354} \times 100\%$
 $= 0,0629\%$

c. Kredit P4K $= \frac{29}{6354} \times 100\%$

$$= 0,4564\%$$

Macet (M)

a. Kredit Komersial $= \frac{6}{6354} \times 100\%$

$$= 0,0944\%$$

b. Kredit Tapsun $= \frac{147}{6354} \times 100\%$

$$= 2,3135\%$$

c. Kredit Exchuting $= \frac{8}{6354} \times 100\%$

$$= 0,1259\%$$

d. Kredit Channeling $= \frac{107}{6354} \times 100\%$

$$= 1,6839\%$$

e. Kredit P4K $= \frac{129}{6354} \times 100\%$

$$= 2,0302\%$$

Berdasarkan hasil prosentase pada periode 31 Desember 2005 dapat diketahui bahwa prosentase jumlah debitur pada kategori kurang lancar(KL) tertinggi pada kredit P4K sebesar 0,4249%; kredit tapsun sebesar 0,2675% dan kredit komersial sebanyak 0,0629%. Pada kategori diragukan(D) tertinggi pada kredit P4K sebesar 0,4564%; kredit tapsun sebesar 0,2203% dan kemudian kredit exchuting sebesar 0,0629%. Sedangkan pada kategori Macet(M) tertinggi pada kredit tapsun sebesar 2,3135%; kredit P4K sebesar 2,0302%; kredit Canneling sebesar 1,6839%; kredit Exchuting sebesar 0,1259%; kemudian kredit komersial sebesar 0,0944%.

Apabila dilihat secara keseluruhan, terdapat kecenderungan terjadi penurunan prosentase jumlah debitur walaupun secara tidak signifikan pada tiap kolektibilitas dari kurang lancar(KL) sebesar 0,7554%, menjadi 0,7396% pada kolektibilitas diragukan(D) dan Macet(M) sebesar 6,2480%. Kredit Tapsun memiliki prosentase jumlah debitur paling banyak dan tertinggi sebesar 2,31% pada kategori diragukan(D), dan kredit Exchcuting memiliki prosentase jumlah debitur sedikit dan terendah sebesar 0,06%.

Tabel 4.8

**Hasil Analisis Prosentase (%) Debitur Kredit Modal Kerja
Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 Desember 2005**

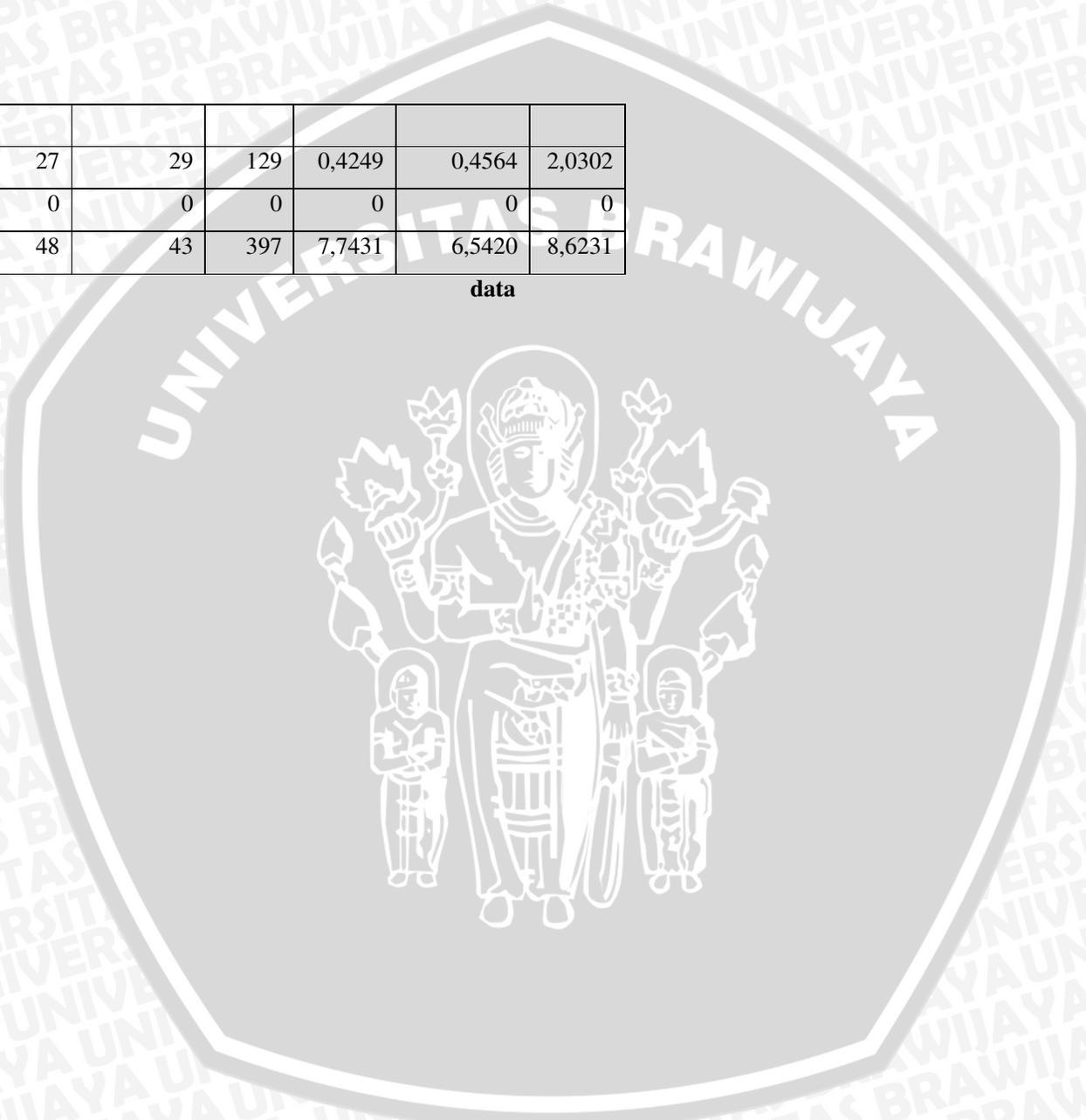
No	Jenis Kredit	Jumlah Debitur			Jenis Kolektibilitas		
		Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)
1.	Kredit Komersial	4	0	6	0,0629	0	0,0944
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0	0	0	0
3.	Kredit Tapsun	17	14	147	0,2675	0,2203	2,3135
4.	Kredit KKB	0	0	0	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	0	4	8	0	0,0629	0,1259
6.	Kredit	0	0	107	0	0	1,6839

	Chanelling						
7.	Kredit P4K	27	29	129	0,4249	0,4564	2,0302
8.	Kredit KPK	0	0	0	0	0	0
Jumlah		48	43	397	7,7431	6,5420	8,6231

Sumber:

data

diolah



Adapun prosentase(%) debitur kredit modal kerja dilihat berdasarkan jenis kredit yang diberikan untuk Periode 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL):

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit Komersial} &= \frac{2}{6206} \times 100\% \\ &= 0,0322\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kredit Tapsun} &= \frac{10}{6206} \times 100\% \\ &= 0,1611\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit P4K} &= \frac{12}{6206} \times 100\% \\ &= 0,1933\% \end{aligned}$$

Diragukan (D):

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit Komersial} &= \frac{3}{6206} \times 100\% \\ &= 0,0483\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kredit Tapsun} &= \frac{17}{6206} \times 100\% \\ &= 0,2739\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit Exchuting} &= \frac{2}{6206} \times 100\% \\ &= 0,0322\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Kredit P4K} &= \frac{11}{6206} \times 100\% \\ &= 0,1772\% \end{aligned}$$

Macet (M):

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit Komersial} &= \frac{11}{6206} \times 100\% \\ &= 0,1772\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kredit Tapsun} &= \frac{121}{6206} \times 100\% \\ &= 1,9497\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit Exchuting} &= \frac{20}{6206} \times 100\% \\ &= 0,3222\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Kredit Channeling} &= \frac{107}{6206} \times 100\% \\ &= 1,7241\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e. Kredit P4K} &= \frac{90}{6206} \times 100\% \\ &= 1,4502\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil prosentase pada periode 31 Desember 2006 dapat diketahui bahwa prosentase jumlah debitur pada kategori kurang lancar(KL) tertinggi pada kredit P4K sebesar 0,1933%; kredit tapsun 0,1611%; kemudian kredit komersial sebesar 0,0322%. Pada kategori diragukan(D) tertinggi pada kredit tapsun sebesar 0,2739%; kredit P4K sebesar 0,1772%; kredit komersial 0,0483%; kemudian kredit exchuting sebesar 0,0322%. Sedangkan pada kategori macet(M) tertinggi pada kredit tapsun sebesar 1,9497%; kredit channeling sebesar 1,7241%; kredit P4K sebesar 1,7241%; kredit exchuting sebesar 0,3222%; kemudian kredit komersial sebesar 0,1772%.

Apabila dilihat secara keseluruhan terjadi kenaikan jumlah prosentase debitur pada tiap kolektibilitas secara signifikan, dimana pada kategori kurang lancar(KL) sebesar 0,3867%, menjadi 0,5317% pada kolektibilitas diragukan(D) dan naik menjadi 5,6235% pada kategori Macet(M). Pada periode 31 Desember 2006 kredit Tapsun memiliki prosentase jumlah debitur paling banyak dan tertinggi sebesar 1,9497% pada kategori kurang lancar(KL), dan kredit komersial memiliki prosentase jumlah debitur sedikit dan terendah sebesar 0,0322% pada kategori kurang lancar(KL) dan Kredit Exchuting pada kategori diragukan(D) karena memiliki jumlah prosentase yang sama.

Tabel 4.9

**Hasil Analisis Prosentase (%) Debitur Kredit Modal Kerja
Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 Desember 2006**

No	Jenis Kredit	Jumlah Debitur			Jenis Kolektibilitas (%)		
		Kurang Lancar (KL)	Diraguka (D)	Macet (M)	Kurang Lancar (KL)	Diraguka (D)	Macet (M)
1.	Kredit Komersial	2	3	11	0,0322	0,0483	0,1772
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0	0	0	0
3.	Kredit Tapsun	10	17	121	0,1611	0,2739	1,9497
4.	Kredit KKB	0	0	0	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	0	2	20	0	0,0322	0,3222
6.	Kredit Chanelling	0	0	107	0	0	1,7241
7.	Kredit P4K	12	11	90	0,1933	0,1772	1,4502
8.	Kredit KP6	0	0	0	0	0	0
Jumlah		24	33	349	0,3867	0,5317	5,6235

Sumber: data diolah

Adapun prosentase debitur kredit modal kerja dilihat berdasarkan jenis kredit yang diberikan untuk Periode 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL):

$$\text{a. Kredit Komersial} = \frac{16}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,2809\%$$

$$\text{b. Kredit Pegawai BRI} = \frac{15}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,2634\%$$

$$\text{c. Kredit Tapsun} = \frac{11}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,1931\%$$

$$\text{d. Kredit Exchuting} = \frac{11}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,1931\%$$

Diragukan (D):

$$\text{a. Kredit Komersial} = \frac{6}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,1053\%$$

$$\text{b. Kredit Pegawai BRI} = \frac{12}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,2107\%$$

$$\text{c. Kredit Tapsun} = \frac{16}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,2809\%$$

$$\text{d. Kredit Exchuting} = \frac{27}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,4741\%$$

$$\text{e. Kredit P4K} = \frac{3}{5694} \times 1000\%$$

$$= 0,0527\%$$

Macet (M):

$$\text{a. Kredit Komersial} = \frac{10}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,1756\%$$

$$\text{b. Kredit Pegawai BRI} = \frac{35}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,6146\%$$

$$\text{c. Kredit Tapsun} = \frac{67}{5694} \times 100\%$$

$$= 1,1766\%$$

$$\text{d. Kredit Exchuting} = \frac{134}{5694} \times 100\%$$

$$= 2,3533\%$$

$$\text{e. Kredit Channeling} = \frac{107}{5694} \times 100\%$$

$$= 1,8791\%$$

$$\text{f. Kredit P4K} = \frac{21}{5694} \times 100\%$$

$$= 0,3688\%$$

Berdasarkan hasil prosentase debitur pada periode 31 Desember 2007 dapat diketahui bahwa prosentase jumlah debitur pada kategori kurang lancar(KL) tertinggi pada kredit komersial sebesar 0,2809%; kredit pegawai BRI sebesar 0,2634%; kredit tapsun sebesar 0,1931%; kemudian kredit exchuting sebesar 0,1931%. Pada kategori diragukan(D) tertinggi pada kredit exchuting 0,4741%; kredit tapsun sebesar 0,2809%; kredit pegawai BRI sebesar 0,2107%; kredit komersial sebesar 0,1053%; kemudian kredit P4K sebesar 0,0527%. Sedangkan pada kategori macet(M) tertinggi pada kredit exchuting sebesar 2,3533%; kredit channeling sebesar 1,8791%; kredit tapsun sebesar 1,766%; kredit pegawai BRI sebesar 0,6146%; kredit P4K sebesar 0,3688%; kemudian kredit komersial sebesar 0,18%.

Apabila dilihat secara keseluruhan terjadi kenaikan pada setiap kolektibilitas pada periode 31 Desember 2007 yaitu mulai pada kolektibilitas kurang lancar (KL) sebesar 0,9308% menjadi 1,1239% pada kolektibilitas

diragukan(D) dan naik pada kolektibilitas macet(M) sebesar 6,5683%. Kredit Exchuting memiliki prosentase jumlah debitur paling banyak dan tertinggi sebesar 2,3533% pada kategori diragukan(D), dan kredit P4K memiliki prosentase jumlah debitur sedikit dan terendah sebesar 0,0527% pada kategori diragukan(D).

Tabel 4.10

**Hasil Analisis Prosentase (%) Debitur Kredit Modal Kerja
Berdasarkan Jenis Kredit Periode 31 Desember 2007**

No	Jenis Kredit	Jumlah Debitur			Jenis Kolektibilitas (%)		
		Kurang Lancar (KL)	Diraguka (D)	Macet (M)	Kurang Lancar (KL)	Diraguka (D)	Macet (M)
1.	Kredit Komersial	16	6	10	0,2809	0,1053	0,1756
2.	Kredit Pegawai BRI	15	12	35	0,2634	0,2107	0,6146
3.	Kredit Tapsun	11	16	67	0,1913	0,2809	0,1766
4.	Kredit KKB	0	0	0	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	11	27	134	0,1913	0,4741	2,3533
6.	Kredit Chanelling	0	0	107	0	0	1,8791
7.	Kredit P4K	0	3	21	0	0,0527	0,3688
8.	Kredit KP6	0	0	0	0	0	0
Jumlah		53	64	374	0,9308	1,1239	6,5683

Sumber: data diolah

Tabel 4.11

**Perbandingan Prosentase (%) Jumlah Debitur
Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007**

Jenis Kolektibilitas	Jenis Kredit	Tahun				
		2005	2006	2007		
Kurang Lancar						
1.	Kredit Komersial	0,0629	0,0322	0,2809		
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0,2634		
3.	Kredit Tapsun	0,2675	0,1611	0,1913		
4.	Kredit KKB	0	0	0		
5.	Kredit Exchuting	0	0	0,1913		
6.	Kredit Chanelling	0	0	0		
7.	Kredit P4K	0,4249	0,1933	0		
8.	Kredit KP6	0	0	0		
Jumlah		0,7554	0,3867	0,9308		
Diragukan						
1.	Kredit Komersial	0	0,0483	0,1053		
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0,2107		
3.	Kredit Tapsun	0,2203	0,2739	0,2809		
4.	Kredit KKB	0	0	0		
5.	Kredit Exchuting	0,0629	0,0322	0,4741		
6.	Kredit Chanelling	0	0	0		
7.	Kredit P4K	0,4564	0,1772	0,0527		
8.	Kredit KP6	0	0	0		
Jumlah		6,5420	0,5317	1,1239		
Macet						
1.	Kredit Komersial	0,0944	0,1772	0,1756		
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0,6146		
3.	Kredit Tapsun	2,3135	1,9497	0,1766		
4.	Kredit KKB	0	0	0		
5.	Kredit Exchuting	0,1259	0,3222	2,3533		
6.	Kredit Chanelling	1,6839	1,7241	1,8791		
7.	Kredit P4K	2,0302	1,4502	0,3688		
8.	Kredit KP6	0	0	0		
Jumlah		6,2480	5,6235	6,5683		
Total jumlah Debitur		7,7431	6,5420	8,6231		

Sumber: data diolah

Apabila dilihat dari tabel Perbandingan Prosentase (%) Jumlah Debitur Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan pada jumlah debitur pada setiap periode.

Apabila dibandingkan tiap periode pada kategori kolektibilitas kurang lancar(KL) dapat diketahui bahwa pada Kredit Komersial terjadi penurunan, dimana pada tahun 2005 sebesar 0,0629% menjadi 0,0322% pada tahun 2006 dan naik secara signifikan pada tahun 2007 menjadi 0,2809%. Kredit pegawai BRI yang mana pada 2(dua) periode sebelumnya tidak ada tunggakan jumlah debitur pada tahun 2007 terdapat tunggakan sebesar 0,2634%. Kredit Tapsun mengalami penurunan jumlah debitur dimana pada tahun 2005 sebesar 0,2675%, menjadi 0,1611%, dan tahun 2007 naik menjadi 0,1913, walaupun terjadi kenaikan tetapi tidak melebihi dari prosentase tahun 2005. dan kenaikan juga pada kredit exchuting dimana pada (2dua) periode sebelumnya tidak ada, pada tahun 2007 menjadi 0,1931%. Sedangkan pada kredit P4K terjadi penurunan jumlah debitur dari tahun 2005 sebesar 0,4564% menjadi 0,1772% pada Tahun 2006 dan 0,0527 pada tahun 2007.

Apabila dilihat secara keseluruhan pada kategori kolektibilitas Kurang Lancar(KL) selama 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan prosentase jumlah debitur pada tahun 2007. Jumlah prosentase debitur tertinggi pada tahun 2007 sebesar 0,9308% dan jumlah prosentase kredit terbesar pada kredit P4K sebesar 0,4249.

Pada kategori diragukan selama 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa pada kredit Komersial dari tahun 2005 sebesar 0,0483% naik menjadi 0,1053% pada tahun 2007. Terdapat kredit pegawai BRI pada tahun 2007 sebesar 0,2107%. Kredit tapsun mengalami kenaikan pada tahun 2005 sebesar 0,2203% menjadi 0,2739% pada tahun 2006 dan 0,2809% pada tahun 2007. Kredit Exchuting tahun 2005 sebesar 0,0629% menjadi 0,0322% pada tahun 2006 dan mengalami kenaikan pada tahun 2007 sebesar 0,4741%. Sedangkan pada kredit P4K mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 0,4564% menjadi 0,1772% pada tahun 2006 dan 0,0527 pada tahun 2007.

Apabila dilihat secara keseluruhan pada kategori kolektibilitas diragukan(D) terdapat kecenderungan penurunan pada jumlah prosentase

debitur pada tahun 2005 sebesar 6,5420% menjadi 0,5317% pada tahun 2006 dan 1,1239% pada tahun 2007, walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2007 tetapi tidak terlampaui signifikan karena masih dibawah tahun 2005. Jumlah prosentase terbesar sebanyak 6,5420% pada tahun 2005 dan pada kredit P4K sebesar 0,4564% .

Pada kategori Macet(M) pada 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa kredit komersial terjadi peningkatan dari tahun 2005 sebesar 0,0944% menjadi 0,1772% pada tahun 2006 dan 0,1756% pada tahun 2007. Terdapat kredit pegawai BRI sebesar 0,6146% pada tahun 2007. Kredit tapsun terjadi penurunan pada tahun 2005 sebesar 2,3135% menjadi 1,9497% pada tahun 2006 dan 0,1766% pada tahun 2007. Kredit Exchuting mengalami kenaikan pada tahun 2005 sebesar 0,1259% menjadi 0,3222% pada tahun 2006 dan 2,3533% pada tahun 2007. Kredit exchuting juga mengalami kenaikan pada tahun 2005 sebesar 1,6839% menjadi 1,7241% pada tahun 2006 dan 1,8791% pada tahun 2007. Kredit P4K mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 2,0305% menjadi 1,4502% pada tahun 2006 dan 0,3688% pada tahun 2007.

Apabila dilihat secara keseluruhan pada kolektibilitas Macet(M) selama 3(tiga) periode dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan prosentase jumlah debitur pada tahun 2005 dan 2007, dimana jumlah prosentase tertinggi pada tahun 2007 sebesar 6,5683% dan kredit terbesar pada kredit exchuting sebesar 2,3533% pada tahun 2007. Berdasarkan hasil tabel perbandingan prosentase jumlah debitur dapat diketahui bahwa jumlah prosentase tertingi pada Kredit Macet pada tahun 2007 sebesar 6,5683% dan kredit exchuting memiliki tingkat jumlah prosentase debitur tertinggi sebesar 2,3533% pada kolektibilitas Macet(M).

Apabila dilihat secara keseluruhan perbandingan prosentase jumlah debitur selama 3(tiga) periode, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan jenis kredit yang diberikan pada debitur pada kolektibilitas kurang lancar(KL) tertinggi pada kredit P4K sebesar 0,4249% pada tahun 2005, pada kolektibilitas diragukan(D) tertinggi pada kredit Exchuting sebesar 0,4741% pada tahun 2007, dan pada kolektibilitas Macet(M) tertinggi pada kredit Exchuting pada tahun 2007.

- b. Pada kolektibilitas kurang lancar(KL) jumlah kredit tertinggi pada tahun 2007 sebesar 0,9308%, pada kolektibilitas diragukan(D) tertinggi pada tahun 2005 sebesar 6,5420% dan pada kolektibilitas Macet(M) tertinggi pada tahun 2007 sebesar 6,5683%.
- c. Secara keseluruhan selama 3(tiga) periode jumlah kredit tertinggi pada tahun 2007 sebesar 6,5683% dengan jenis kredit terbesar pada Kredit Exchuting sebesar 2,3533%.
- d. Berdasarkan prosentase total tunggakan jumlah debitur dapat diketahui bahwa prosentase jumlah debitur tertinggi pada tahun 2007 dengan prosentase 8,6231%, kemudian pada tahun 2005 sebesar 7,74431% dan pada tahun 2006 dengan jumlah prosentase sebesar 6,5420%.

Perhitungan Prosentase (%) Tunggakan Kredit Yang Disalurkan

Dalam melakukan analisis tunggakan kredit yaitu dengan membandingkan jumlah tunggakan kredit dengan jumlah kredit yang disalurkan. Perbandingan kredit dilakukan untuk mengetahui berapa prosentase tunggakan kredit modal kerja(KMK) terhadap jumlah kredit modal kerja(KMK) yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung selam 3(tiga) periode yaitu periode 31 Desember 2005 sampai dengan periode 31 Desember 2007.

Berikut perhitungan prosentase(%) jumlah kredit yang disalurkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL)

- a. Tahun 2005 = $\frac{3.320.624}{217.892.638} \times 100\%$
= 1,52%
- b. Tahun 2006 = $\frac{1.095.889}{255.098.092} \times 100\%$
= 0,43%
- c. Tahun 2007 = $\frac{2.999.524}{308.117.933} \times 100\%$
= 0,97%

Diragukan (D)

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2005} &= \frac{520.482}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,24\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Tahun 2006} &= \frac{656.383}{255.098.092} \times 100\% \\ &= 0,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Tahun 2007} &= \frac{1.453.222}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,47\% \end{aligned}$$

Macet (M)

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2005} &= \frac{12.876.736}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 5,90\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Tahun 2006} &= \frac{13.708.492}{255.098.092} \times 100\% \\ &= 5,3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Tahun 2007} &= \frac{15.029.823}{308.117.933} \times 100 \\ &= 4,88\% \end{aligned}$$

Total Tunggakan

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2005} &= \frac{16.717.843}{217.892.638} \times 100 \\ &= 7,67\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Tahun 2006} &= \frac{15.460.764}{255.098.092} \times 100\% \\ &= 6,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Tahun 2007} &= \frac{19.482.569}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 6,23\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja (KMK) yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12

**Hasil Prosentase Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK)
terhadap kredit yang disalurkan
Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007**

Tahun	Jenis Kolektibilitas			Total Tunggakan (Rp)	Prosentase (%)			
	Kurang Lancar (KL) (Rp)	Diragukan (D) (Rp)	Macet (M) (Rp)		Kurang Lancar (KL) (%)	Diragukan (D) (%)	Macet (M) (%)	Total (%)
	2005	3.320.624	520.482		12.876.737	16.717.843	1,53	0,24
2006	1.095.889	656.383	13.708.492	15.460.764	0,43	0,26	5,37	6,06
2007	2.999.524	1.453.222	15.029.823	19.482.569	0,97	0,48	4,87	6,32

Sumber: Data diolah

Adapun perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja(KMK) yang disalurkan untuk periode 31 Desember 2005 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL)

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit Komersial} &= \frac{3.058.599}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 1,40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kredit Tapsun} &= \frac{180.919}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,08\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit P4K} &= \frac{81.106}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,08\% \end{aligned}$$

Diragukan (D)

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit Tapsun} &= \frac{135.137}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kredit Exchuting} &= \frac{280.008}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit P4K} &= \frac{105.337}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,05\% \end{aligned}$$

Macet (M)

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit Komersial} &= \frac{711.866}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kredit Tapsun} &= \frac{1.043.848}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,48\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit Exchuting} &= \frac{1.036.917}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Kredit Channeling} &= \frac{9.639.166}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 4,42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e. Kredit P4K} &= \frac{444.940}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,20\% \end{aligned}$$

Total Tunggalan

$$\begin{aligned} \text{a. Kurang Lancar (KL)} &= \frac{3.320.624}{217.892.634} \times 100\% \\ &= 1,52\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Diragukan (D)} &= \frac{520.482}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 0,23\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Macet (M)} &= \frac{12.876.737}{217.892.638} \times 100\% \\ &= 5,90\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja (KMK) yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Cabang Tulungagung periode 31 Desember 2005 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Prosentase Tunggakan Kredit Modal Kerja (KMK)
Yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Kredit Yang Diberikan
Periode 31 Desember 2005

No	Jenis Kredit	Jenis Kolektibilitas				Presentase (%)			
		Kurang Lancar (KL) (Rp)	Diragukan (D) (Rp)	Macet (M) (Rp)	Total Tunggakan (Rp)	Kurang Lancar (KL) (%)	Diragukan (D) (%)	Macet (M) (%)	Total Tunggakan (%)
1.	Kredit Komersial	3.058.599	0	711.866	3.770.465	1,40	0	0,33	1,73
2.	kredit Pegawai BRI	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredit Tapsun	180.919	135.137	1.043.848	1.359.904	0,08	0,06	0,48	0,62
4.	Kredit KKB	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	0	280.008	1.036.917	1.316.925	0	0,13	0,47	0,60
6.	Kredit Chanelling	0	0	9.639.166	9.639.166	0	0	4,42	4,42
7.	Kredit P4K	81.106	105.337	444.940	631.383	0,04	0,05	0,20	0,29
8.	Kredit KP6	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		3.320.624	520.482	12.876.737	16.717.843	1,52	0,24	5,90	7,66

Sumber : data diolah

Adapun perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja(KMK) yang disalurkan untuk periode 31 Desember 2006 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL)

$$\text{a. Kredit Komersial} = \frac{875.000}{255.098.092} \times 100\%$$

$$= 0,34\%$$

$$\text{b. Kredit Tapsun} = \frac{79.825}{255.098.092} \times 100\%$$

$$= 0,03\%$$

$$\text{c. Kredit P4K} = \frac{141.064}{255.098.092} \times 100\%$$

$$= 0,06\%$$

Diragukan (D)

$$\text{a. Kredit Komersial} = \frac{205.960}{255.098.092} \times 100\%$$

$$= 0,08\%$$

$$\text{b. Kredit Tapsun} = \frac{208.521}{255.098.092} \times 100\%$$

$$= 0,08\%$$

$$\text{c. Kredit Exchuting} = \frac{161.817}{255.098.092} \times 100\%$$

$$= 0,06\%$$

$$\text{d. Kredit P4K} = \frac{80.085}{255.098.092} \times 100\%$$

$$= 0,03\%$$

Macet (M)

$$\text{a. Kredit Komersial} = \frac{1.047.470}{255.098.092} \times 100\%$$

$$= 0,41\%$$

$$\text{b. Kredit Tapsun} = \frac{966.714}{255.098.092} \times 100\%$$

$$= 0,38\%$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit exchuting} &= \frac{1.587.646}{255.098.092} \times 100\% \\ &= 0,62\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Kredit Channeling} &= \frac{9.690.815}{255.098.092} \times 100\% \\ &= 3,79\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e. Kredit P4K} &= \frac{435.847}{255.098.092} \times 100\% \\ &= 0,17\% \end{aligned}$$

Total Tunggalan

$$\begin{aligned} \text{a. Kurang Lancar (KL)} &= \frac{1.095.889}{255.098.092} \times 100\% \\ &= 0,42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Diragukan (D)} &= \frac{656.383}{255.098.092} \times 100\% \\ &= 0,25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Macet (M)} &= \frac{13.708.492}{255.098.092} \times 100\% \\ &= 5,37\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja(KMK) yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung periode 31 Desember 2006 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Table 4.14
Hasil Prosentase Tunggalan Kredit Modal Kerja (KMK)
Yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Kredit Yang Diberikan
Periode 31 Desember 2006

No	Jenis Kredit	Jenis Kolektibilitas				Presentase (%)			
		Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet(M)	Total Tunggalan	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	Total Tunggalan
1.	Kredit Komersial	875.000	205.960	1.047.470	2.128.430	0,34	0,08	0,41	0,83
2.	kredit Pegawai BRI	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredit Tapsun	79.825	208.521	966.714	1.225.060	0,03	0,08	0,38	0,49
4.	Kredit KKB	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	0	161.817	1.587.646	1.746.463	0	0,06	0,62	0,68
6.	Kredit Chanelling	0	0	9.670.815	9.670.815	0	0	3,79	3,79
7.	Kredit P4K	141.064	80.085	435.847	659.996	0,06	0,03	0,17	0,25
8.	Kredit KP6	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.095.889	656.383	13.708.492	15.460.764	0,42	0,25	5,37	6,04

Sumber: data diolah

Adapun perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja(KMK) yang disalurkan untuk periode 31 Desember 2007 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

Kurang Lancar (KL)

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit Komersial} &= \frac{2.471.518}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,80\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kredit Pegawai BRI} &= \frac{310.413}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,10\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit Tapsun} &= \frac{149.341}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,05\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Kredit Exchuting} &= \frac{68.252}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,02\% \end{aligned}$$

Diragukan (D)

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit Komersial} &= \frac{924.166}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,30\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kredit Pegawai BRI} &= \frac{96.591}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,03\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit Tapsun} &= \frac{167.599}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,05\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Kredit Exchuting} &= \frac{168.900}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e. Kredit P4K} &= \frac{95.966}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,03\% \end{aligned}$$

Macet (M)

$$\begin{aligned} \text{a. Kredit Komersial} &= \frac{1.959.951}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,64\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Kredit Pegawai BRI} &= \frac{325.285}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Kredit Tapsun} &= \frac{479.758}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. Kredit Exchuting} &= \frac{1.101.897}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,36\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e. Kredit Channeling} &= \frac{9.670.815}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 3,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f. Kredit P4K} &= \frac{1.492.117}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,48\% \end{aligned}$$

Total Tunggakan

$$\begin{aligned} \text{a. Kurang Lancar (KL)} &= \frac{2.999.524}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,97\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Diragukan (D)} &= \frac{1.453.222}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 0,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Macet (M)} &= \frac{15.029.823}{308.117.933} \times 100\% \\ &= 4,88\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja(KMK) yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung periode 31 Desember 2007 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Table 4.15
Hasil Prosentase Tunggalan Kredit Modal Kerja (KMK)
Yang Disalurkan Berdasarkan Jenis Kredit Yang Diberikan
Periode 31 Desember 2007

No	Jenis Kredit	Jenis Kolektibilitas				Prosentase (%)			
		Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet(M)	Total Tunggalan	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet(M)	Total Tunggalan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Kredit Komersial	2.471.518	924.166	1.959.951	5.355.635	0,80	0,30	0,64	1,74
2.	kredit Pegawai BRI	310.413	96.591	325.285	732.289	0,10	0,03	0,11	0,24
3.	Kredit Tapsun	149.341	167.599	479.758	796.698	0,05	0,05	0,16	0,26
4.	Kredit KKB	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	68.252	168.900	1.101.897	1.339.049	0,02	0,06	0,36	0,44
6.	Kredit Chanelling	0	0	9.670.815	9.670.815	0	0	3,13	3,13
7.	Kredit P4K	0	95.966	1.492.117	1.588.083	0	0,03	0,48	0,51
8.	Kredit KP6	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2.999.524	1.453.222	15.029.823	19.482.569	0,97	0,47	4,88	6,32

Sumber: data diolah

Tabel 4.16

Perbandingan Prosentase (%) Tunggakan Kredit yang disalurkan

Periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007

Jenis kolektibilitas	Jenis Kredit	Tahun		
		2005	2006	2007
Kurang Lancar				
1.	Kredit Komersial	1,40	0,34	0,80
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0,10
3.	Kredit Tapsun	0,08	0,03	0,05
4.	Kredit KKB	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	0	0	0,02
6.	Kredit Channeling	0	0	0
7.	Kredit P4K	0,04	0,06	0
8.	Kredit KP6	0	0	0
Jumlah		1,52	0,43	0,97
Diragukan				
1.	Kredit Komersial	0	0,08	0,30
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0,03
3.	Kredit Tapsun	0,06	0,08	0,05
4.	Kredit KKB	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	0,13	0,06	0,06
6.	Kredit Channeling	0	0	0
7.	Kredit P4K	0,05	0,03	0,03
8.	Kredit KP6	0	0	0
Jumlah		0,24	0,25	0,47
Macet				
1.	Kredit Komersial	0,33	0,41	0,64
2.	Kredit Pegawai BRI	0	0	0,11
3.	Kredit Tapsun	0,48	0,38	0,16
4.	Kredit KKB	0	0	0
5.	Kredit Exchuting	0,47	0,62	0,36
6.	Kredit Channeling	4,42	3,79	3,13
7.	Kredit P4K	0,20	0,17	0,48
8.	Kredit KP6	0	0	0
Jumlah		5,90	5,37	4,88
Total Tunggakan (%)		7,76	6,06	6,23
Maksimal		5%	5%	5%

Sumber: data diolah

Berdasarkan data perbandingan prosentase kredit yang disalurkan periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan pada jumlah prosentase tunggakan kredit yang disalurkan.

Pada perbandingan prosentase tunggakan kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dapat diketahui bahwa terdapat kecenderungan penurunan pada periode tahun 2006, dan walaupun ada kenaikan lagi pada periode 2007 tetapi tidak melebihi jumlah prosentase kredit yang disalurkan pada tahun 2005. Jumlah prosentase tunggakan kredit yang disalurkan pada tahun 2005 sebesar 1,52% mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 0,43% pada tahun 2006 dan sedikit peningkatan prosentase pada tahun 2007 menjadi 0,97%. Secara spesifik berdasarkan jenis kredit yang disalurkan dapat dijelaskan bahwa kredit komersial mengalami penurunan, dari tahun 2005 sebesar 1,40% menjadi 0,34% pada tahun 2006 dan peningkatan prosentase pada tahun 2007 sebesar 0,80%. Terdapat kredit pegawai BRI sebesar 0,10% dan kredit exchuting sebesar 0,02% pada tahun 2007 dimana selama 2(dua) periode sebelumnya (pada periode 2005 dan 2006) tidak terdapat adanya tunggakan kredit yang disalurkan. Kredit tapsun mengalami kenaikan pada tahun 2005 sebesar 0,08% dan penurunan pada tahun 2006 sebesar 0,03 dan peningkatan pada tahun 2007 sebesar 0,05%. Sedangkan kredit P4K mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 0,04% menjadi 0,06% pada tahun 2006.

Apabila dilihat secara keseluruhan pada perbandingan prosentase tunggakan kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode pada kategori kolektibilitas Kurang Lancar(KL) dapat disimpulkan bahwa jumlah prosentase tertinggi pada periode tahun 2005 yaitu sebesar 1,52% dengan jenis kredit terbesar pada kredit komersial sebesar 1,40%.

Pada kategori kolektibilitas diragukan(D) selama 3(tiga) periode dapat dijabarkan bahwa terdapat kecenderungan kenaikan pada jumlah prosentase kredit yang diberikan setiap periode yaitu pada tahun 2005 sebesar 0,24% menjadi 0,25% pada tahun 2006 dan 0,47% pada tahun 2007. Berdasarkan jenis kredit yang disalurkan dapat dijelaskan bahwa kredit komersial

mengalami kenaikan dimana pada tahun 2006 sebesar 0,08% menjadi 0,30% pada tahun 2007. terdapat kredit pegawai BRI sebesar 0,03% pada tahun 2007, dimana selama 2(dua) periode sebelumnya tidak ada tunggakan. Kredit tapsun mengalami kenaikan dari tahun 2005 sebesar 0,06% menjadi 0,08% pada tahun 2006 dan penurunan pada tahun 2007 sebesar 0,05%. Kredit Exchuting mengalami penurunan pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 0,06% dari jumlah prosentase kredit yang disalurkan pada tahun 2005 sebesar 0,13%. Sedangkan pada kredit P4K juga mengalami penurunan dengan jumlah prosentase yang sama pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 0,03%, dimana kredit sebelumnya pada tahun 2005 sebesar 0,05%.

Berdasarkan perbandingan prosentase jumlah kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode pada kategori kolektibilitas dapat disimpulkan bahwa jumlah prosentase kredit yang tertinggi pada tahun 2007 sebesar 0,43% dengan jenis kredit yang disalurkan terbesar pada jenis kredit komersial sebesar 0,30%.

Sedangkan pada kategori kolektibilitas Macet(M) dapat dijabarkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan jumlah prosentase kredit pada tahun 2006 dan 2007, yaitu pada tahun 2005 sebesar 5,90% menjadi 5,37% pada tahun 2006 dan 4,88% pada tahun 2007. Berdasarkan jenis kredit yang disalurkan dapat dijelaskan bahwa kredit komersial mengalami kenaikan prosentase dari tahun 2005 sebesar 0,33% menjadi 0,41% pada tahun 2006 dan 0,64% pada tahun 2007. Terdapat kredit pegawai BRI sebesar 0,11% pada tahun 2007, dimana 2(dua) periode sebelumnya tidak terdapat tunggakan. Kredit tapsun mengalami penurunan dimana pada tahun 2005 sebesar 0,48% menjadi 0,38% pada tahun 2006 dan 0,16% pada tahun 2008. Kredit exchuting mengalami kecenderungan kenaikan pada tahun 2006, dimana pada tahun 2005 sebesar 0,47% menjadi 0,62% pada tahun 2006 dan penurunan menjadi 0,36% pada tahun 2007. Kredit channeling mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 4,42% menjadi 3,79% pada tahun 2006 dan 3,13% pada tahun 2007. Sedangkan pada kredit P4K tahun 2005 sebesar 0,20% mengalami penurunan menjadi 0,17% pada tahun 2006 dan kenaikan prosentase pada tahun 2007 sebesar 0,48%.

Berdasarkan perbandingan prosentase kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode pada kategori kolektibilitas Macet(M) dapat disimpulkan bahwa, pada jumlah kredit yang disalurkan tertinggi pada tahun 2005 sebesar 5,90% dan jenis kredit terbesar terdapat pada Kredit Channeling sebesar 4,42%.

Apabila dilihat secara keseluruhan perbandingan prosentase kredit yang disalurkan selama 3(tiga) periode, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dilihat berdasarkan jenis kolektibilitas bahwa pada kolektibilitas Kurang Lancar(KL) tertinggi pada kredit Komersial sebesar 1,40%, kategori Diragukan(D) tertinggi pada kredit Komersial sebesar 0,30% dan pada kategori Macet(M) tertinggi pada kredit Cahanneling sebesar 4,42%.
- b. Dilihat dari jumlah tunggakan kredit yang disalurkan, dapat disimpulkan bahwa pada kategori kolektibilitas Kurang Lancar(KL) tertinggi pada tahun 2005 sebesar 5,90%; pada kategori Diragukan(D) tertinggi pada tahun 2007 sebesar 0,47% dan pada kategori Macet(M) tertinggi pada tahun 2005 sebesar 1,52%.
- c. Berdasarkan tabel perbandingan prosentase tunggakan kredit yang disalurkan selama periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 dapat disimpulkan bahwa kredit Channeling memiliki jumlah tunggakan tertinggi sebesar 4,42%.
- d. Berdasarkan total tunggakan kredit yang disalurkan, tahun 2005 memiliki jumlah tertinggi yaitu 7,76%, diikuti tahun 2007 sebesar 6,23% dan kemudian tahun 2006 sebesar 6,06%.
- e. Secara keseluruhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung memiliki jumlah tunggakan diatas 5%, dimana apabila tunggakan kredit melebihi 5% maka akan mengurangi penilaian terhadap tingkat kesehatan bank tersebut, dimana ketentuan dari Bank Indonesia jumlah tunggakan kredit tidak boleh melebihi *Non Performing Loan* (NPL) yaitu 5%. Makin kecil prosentase tunggakan kredit maka penilaian terhadap kesehatan bank akan makin baik.

4. Analisis dan Evaluasi Pengawasan Kredit

Tunggakan kredit terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung. Adapun sebab-sebab terjadi tunggakan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang pertanian biasanya disebabkan gagal panen, misalnya tanaman rusak karena hama.
- 2) Bencana alam, misalnya banjir.
- 3) Penyalahgunaan pemberian kredit oleh debitur.
- 4) Terjadinya kebangkrutan yang diderita oleh debitur.
- 5) Debitur meninggal dunia.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) cabang Tulungagung dalam menanggulangi masalah penunggakan kredit yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan pada nasabah dan mencarikan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi pada usaha debitur.
- 2) Adanya kunjungan ketempat nasabah untuk memperhatikan perkembangan usaha nasabah.
- 3) Adanya petugas penagihan yang datang kerumah debitur apabila terjadi penunggakan selama 2(dua) bulan.
- 4) Dilakukannya surat panggilan apabila debitur yang terlambat membayar kewajiban kredit sampai 2(dua) bulan.
- 5) Jika penunggakan tidak bisa ditanggulangi, maka dilakukan tindakan penyitaan terhadap jaminan.

Pada umumnya pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung telah berjalan sesuai dengan teknik pengawasan yang bisa memperkecil tunggakan kredit. Ada beberapa kekurangan didalam pelaksanaan pengawasan kredit yang selama ini telah dilakukan antara lain:

- a. Inspeksi on the spot.

Pelaksanaan inspeksi *on the spot* yang dilakukan dalam waktu 3(tiga) bulan sekali tetapi dilakukan hanya dilakukan sewaktu-waktu secara kontinue, dimana *inspeksi on the spot* dilakukan hanya sewaktu-waktu

apabila terjadi penunggakan atau keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank. Sebaiknya pelaksanaan *inspeksi on the spot* lebih diaktifkan lagi karena dimungkinkan resiko terjadi penunggakan akan semakin besar, dan lebih dilakukan lebih sering setiap 1(satu) bulan sekali. Selain juga perlu dilakukannya *inspeksi mendadak* (SIDAK) sebagai upaya pengendalian intern terhadap nasabah sebagai upaya menekan terjadinya penunggakan.

b. Pembinaan terhadap nasabah.

Pembinaan terhadap nasabah dilakukan apabila nasabah terus-menerus melakukan keterlambatan didalam memenuhi kewajiban. Pembinaan terhadap nasabah dilakukan secara lebih terprogram dan terstruktur agar apabila nantinya terjadi penunggakan akan segera dapat diatasi, mengingat kelancaran pembayaran nasabah tergantung pada usaha nasabah yang dijalankan. Pembinaan tidak hanya dilakukan pada usaha nasabah, tetapi juga pada perkembangan usaha selanjutnya dan juga ketika nasabah mengalami masalah.

c. Dalam pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung dimana pelaksanaan pengawasan dilakukan selain secara *preventif* juga juga bersifat *represif* yaitu untuk menyelamatkan kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar. Dalam penyelamatan kredit terdapat kelemahan, dimana tindakan penyelamatan kredit baru bisa dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang (Pinca) sebagai pemegang kebijakan. Dalam hal ini tugas *Account Officer* (AO) hanya sebatas mengawasi dan melaporkan jika terjadi kemacetan/ penunggakan/ penyimpangan terhadap kredit yang diberikan. Hal ini sangat merugikan bagi pihak bank, karena dikhawatirkan apabila Pimpinan tidak segera memberikan keputusan maka akan memperbesar terjadinya tunggakan kredit. Untuk itu, dalam hal ini diharapkan *Account Officer* (AO) diberikan wewenang penuh dalam pembinaan terhadap nasabah.

d. Berdasarkan prosentase tunggakan kredit yang disalurkan, pada tahun 2005 sebesar 7,76%, tahun 2007 sebesar 6,23% dan tahun 2006 sebesar

6,06% dapat dilihat bahwa tunggakan kredit yang diberikan melebihi *Non Performing Loan* (NPL) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dimana apabila prosentase tunggakan kredit suatu bank lebih besar dibandingkan dengan NPL yang ditetapkan oleh BI, maka hal itu akan mengurangi penilaian terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu pengawasan kredit yang dilaksanakan oleh BRI harus dapat ditingkatkan hingga prosentase tunggakan dapat mendekati atau mencapai 0% karena semakin kecil prosentase tunggakan kredit maka penilaian terhadap kesehatan bank akan semakin baik. Untuk itu perhatian terhadap kegiatan pelaksanaan perkreditan harus diarahkan pada usaha meminimalisasi terjadinya kegagalan kredit yang diindikasikan melalui timbulnya tunggakan angsuran kredit.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi merupakan pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian atau pemisahan fungsi dapat digunakan untuk mencegah terjadinya praktek yang tidak sehat dalam organisasi. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung telah menerapkan struktur organisasi perusahaan tetapi terdapat penerapan fungsi dominan yaitu pada fungsi *Accountt Officer* (AO). Dalam tugasnya *Account Officer* (AO) tidak hanya bertugas dalam melakukan kunjungan lapangan ke nasabah tetapi juga analisis data dimana seharusnya analisis data dilakukan oleh pihak Administrasi Kredit (ADK) selain juga melakukan pengawasan langsung kepada debitur.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung adalah pengawasan *inspeksi on the spot* dan pembinaan debitur.
3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung telah memberikan Kredit Modal Kerja(KMK) terbagi dalam 5(lima) kolektibilitas yaitu Lancar(L), Dalam Perhatian Khusus(DPK), Kurang Lancar(KL), Diragukan(D) dan Macet(M). Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung yang disebut tunggakan kredit adalah kredit yang termasuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar(KL), Diragukan(D) dan Macet(M).
4. Secara keseluruhan selama 3(tiga) periode jumlah kredit tertinggi pada tahun 2007 sebesar 6,5683% dengan jenis kredit terbesar pada Kredit Exchuting sebesar 2,3533%. Berdasarkan prosentase total tunggakan jumlah debitur dapat diketahui bahwa prosentase jumlah debitur tertinggi pada tahun 2007 dengan prosentase 8,6231%, kemudian pada tahun 2005

sebesar 7,7431% dan pada tahun 2006 dengan jumlah prosentase sebesar 6,5420%.

5. Berdasarkan tabel perbandingan prosentase tunggakan kredit yang disalurkan selama periode 31 Desember 2005 s/d 31 Desember 2007 dapat disimpulkan bahwa kredit Channeling memiliki jumlah tunggakan tertinggi sebesar 4,42%. Berdasarkan total tunggakan kredit yang disalurkan, tahun 2005 memiliki jumlah tertinggi yaitu 7,76%, diikuti tahun 2007 sebesar 6,23% dan kemudian tahun 2006 sebesar 6,06%.
6. Secara keseluruhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung memiliki jumlah tunggakan diatas 5%, dimana apabila tunggakan kredit melebihi 5% maka akan mengurangi penilaian terhadap tingkat kesehatan bank tersebut, dimana ketentuan dari Bank Indonesia jumlah tunggakan kredit tidak boleh melebihi *Non Performing Loan* (NPL) yaitu 5%. Makin kecil prosentase tunggakan kredit maka penilaian terhadap kesehatan bank akan makin baik.
7. Pelaksanaan pengawasan pemberian kredit modal kerja (KMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih belum efektif, terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah tunggakan kredit modal kerja (KMK) yang terjadi selama 3(tiga) periode yaitu 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2007.
8. Adanya tunggakan yang terjadi dikarenakan banyak faktor, seperti gagal panen, bencana alam, penyalahgunaan pemberian kredit, kebangkrutan, dan debitur meninggal dunia.

B. SARAN

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung harus lebih memperhatikan pembagian tugas dan tanggungjawab sehingga tidak terjadi fungsi dominan pada satu fungsi bagian yang berlebihan. Bagian ADK sebaiknya dipisahkan secara tegas, seperti bagian *legal*, bagian *credit investasi* dan bagian kredit jaminan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) agar lebih ditingkatkan. Pengawasan yang intensif dan optimal dapat digunakan untuk membantu pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Cabang Tulungagung untuk menekan/ mengurangi tingkat tunggakan kredit. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung dalam melakukan analisis kredit diharapkan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian dan ketrampilan khusus dalam melakukan analisis kredit.

3. Pengawasan kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung harus dapat ditingkatkan hingga prosentase tunggakan dapat mendekati atau mencapai 0% karena semakin kecil prosentase tunggakan kredit maka penilaian terhadap kesehatan bank akan semakin baik. Untuk itu perhatian terhadap kegiatan pelaksanaan perkreditan harus diarahkan pada usaha meminimalisasi terjadinya kegagalan kredit yang diindikasikan melalui timbulnya tunggakan angsuran kredit.
4. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tulungagung hendaknya lebih selektif dalam pemberian jenis kredit kepada usaha debitur diberikan. Ini diharapkan tidak terjadi penunggakan yang berlebihan pada sektor usaha kredit tertentu.

BIODATA

Nama : PUJIASTUTI

NIM : 0410320110

Tempat/ Tanggal Lahir : Tulungagung, 3 Oktober 1985

Alamat : Ds. Samir RT. 03/ RW. 03

Kec. Ngunut – Kab. Tulungagung

Pendidikan :

1) SDN Kacangan 01 (1992 – 1998)

2) SLTPN 01 Ngunut (1998 – 2001)

3) SMUN 01 Ngunut (2001-2004)

4) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya (2004-2009)

